



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	10
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat 1. Dirut PT. BEI; 2. Dirut KPEI; 3. Dirut KSEI;
Dengan	:	4. Ketua AAEI; 5. Ketua APPI; 6. Ketua AAUI; 7. Ketua AAJI;
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 24 Juni 2019
Waktu	:	14.00 WIB s.d WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Soepriyatno
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Soedjarwono
Acara	:	Kinerja Keuangan Pasar Modal, Kinerja Perasuransian dan Kinerja Perusahaan Pembiayaan
Hadir	:	PEMERINTAH: 1. DIRUT PT. BEI; 2. DIRUT KPEI; 3. DIRUT KSEI; 4. KETUA AAEI; 5. KETUA APPI; 6. KETUA AAUI; 7. KETUA AAJI;

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRIYATNO/F-P. GERINDRA/WAKIL KETUA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Dirut PT. Bursa Efek Indonesia beserta jajarannya,
Yang saya hormati Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia beserta jajarannya,
Yang saya hormati Ketua Asosiasi Analisis Efek Indonesia beserta jajarannya,
Yang saya hormati Dirut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia beserta jajarannya,
Yang saya hormati Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia beserta jajarannya,
Yang saya hormati Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan beserta jajarannya,
Yang saya hormati Anggota Komisi XI DPR RI,
Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat, daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 14 Anggota, 7 Fraksi, sekarang masih ada yang sholat dan persiapan keruangan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT. Bursa Efek Indonesia, Dirut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Ketua Analisis Efek Indonesia, Ketua Asuransi Umum Indonesia, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga apa yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada siang hari ini sampai sore nanti dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Aamiin.

Karena masih dalam suasana Idul Fitri, ijin kami Komisi XI DPR RI mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah mohon maaf lahir dan batin, apabila dalam interaksi selama ini terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita pada bulan Ramadhan dan mempertemukan kita pada bulan Ramadhan yang akan datang. Aamiin.

Hadirin yang kami hormati.

Agenda rapat hari ini adalah pembahasan kinerja keuangan pasar modal, kinerja perasuransian dan kinerja perusahaan pembiayaan. Sebagaimana kita ketahui pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi bagi domestic maupun asing, namun juga bagi para pelaku ekonomi. Dengan pasar modal yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dapat lebih mudah diraih.

Pasar modal bukan lagi sekedar menjadi pelengkap pembiayaan melainkan sudah menjadi salah satu pilihan utama dalam pembiayaan usaha. Pasar modal juga berfungsi sebagai alat dalam upaya pendalaman pasar keuangan. Perluasan variasi produk, pasar modal akan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investor yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan.

Sejalan dengan perkembangan pasar modal tersebut di atas, perusahaan perasuransian tahun 2019 diharapkan mampu mencapai pendapatan premi asuransi jiwa yang akan tumbuh sekitar 10% sampai 20%. Hal ini didukung oleh pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, akan mempengaruhi kinerja investasi industry yang kemudian akan diikuti dengan pertumbuhan pendapatan premi.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat siang hari ini telah hadir bersama kita ada 7 perusahaan tadi yang sudah saya sebutkan. Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini Komisi XI DPR RI ingin mendengarkan penjelasan kinerja keuangan dan bisnis dari Dirut PT. Bursa Efek Indonesia, Dirut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Direktur Utama PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, Ketua Analisis Efek Indonesia, Ketua Asuransi Umum Indonesia, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Selanjutnya kami persilakan dulu kepada Dirut PT. Bursa Efek Indonesia, jangan panjang-panjang Pak, karena 7 entitas yang datang pada siang hari ini saya kira kami berikan waktu 10 menit masing-masing, sehingga nanti kita bisa berinteraksi dan melakukan pendalaman.

Saya kira itu kami persilakan dulu dari Bursa Efek Indonesia.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

**Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Soepriyatno, Bapak Hafisz, Bapak Marwan,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI,
Serta Ibu dan Bapak Ketua Asosiasi Asuransi, Asosiasi Industri Pembiayaan,
serta rekan-rekan Direksi.**

Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan perkembangan kinerja pasar modal serta rencana pengembangan kedepannya.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bursa Efek Indonesia didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Di samping itu lembaga kliring dan penjaminan (LKP) dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, menyediakan jasa Kustodian Sentral dan penyelesaian transaksi yang terakhir, wajar dan efisien.

Hal ini menempatkan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai institusi yang berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung aktifitas perdagangan efek di Indonesia dan bersama-sama disebut sebagai SRO (Self Regulatory Organizational).

Melalui penyediaan dan pengelolaan sistem dan sarana perdagangannya efektif diharapkan proses transaksi efek di pasar modal dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan *common practice* di tingkat global. Melalui supervisi dan koordinasi bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau SRO akan selalu mengedepankan upaya pendalaman pasar keuangan melalui fasilitas penggalangan dana masyarakat kepada seluruh perusahaan maupun institusi yang membutuhkan pendanaan untuk pengembangan kedepan.

Ini adalah struktur SRO dan anak perusahaan, dapat kita lihat bahwasanya Bursa Efek Indonesia memiliki berbagai perusahaan pendukung yang antara lain yang kita namakan dengan SRO adalah KPI kita memiliki KPI 100% dan KSEI itu 20%. Di mana SRO ini memiliki anak-anak perusahaan yang antara lain adalah Pefindo itu adalah pemeringkat efek atau kredit rating. Lalu Pefindo Biro Kredit yang paling sebelah kanan itu adalah institusi biro kredit. Lalu untuk ke edukasi itu ada namanya teach me, ada institusi perlindungan investor yang kita sebut SIPF, lalu PHEI itu untuk penilai harga obligasi atau efek. Lalu kita juga punya TV, yaitu kita sebut IDX Channel, lalu kita juga memiliki untuk pendanaan efek yang kita sebut sebagai PEI, serta yang terakhir yang paling baru adalah kita memiliki institusi pengembang teknologi informasi atau kita singkat sebagai IDXSPI, ini anak perusahaan yang terbaru.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pasar modal berada dalam jalur positif sejak privatisasi tahun 1992. Kita bisa lihat bahwasanya pada tahun 1992 indeks kita adalah 321. Lalu yang terakhir per hari ini itu kira-kira kita sudah mencapai per 19 Februari 2018 itu adalah 6.689. Naik cukup besar hampir melebihi 20 kalinya dari tahun 1992.

Ini adalah apa yang inisiatif-inisiatif yang telah kita lakukan di 2018, yaitu kita menaikkan atau pembaharuan sistem perdagangan dan new data center pada tanggal 7 Mei 2018. Kita bisa lihat bahwasanya peningkatan sistem perdagangan ini mampu meningkatkan availability sistem perdagangan hingga 99,9% dengan kapasitas proses transaksi meningkat hingga 3 kali lipat, baik dari sisi capacity yang dulunya 5 juta order bisa menjadi 15 dan juga trading 2,5 juta menjadi 7,5 juta. Demikian pula dengan *performance*-nya naik signifikan dari 4 ribu order per second menjadi 12.500 order per second.

Selain itu pada tanggal 26 November 2018 yang lalu, pasar modal Indonesia berhasil mempercepat waktu settlement dari perdagangan sebelumnya T-3 menjadi T-2. Keberhasilan ini menjadikan bursa sebagai bursa yang ketiga di Asia setelah Vietnam dan Thailand. Sesuai dengan *take line*-nya sehari lebih cepat, selangkah lebih efisien dapat kami sampaikan bahwa program ini menuai kesuksesannya yang luar biasa. Dapat dilihat pada materi bahwa likuiditas perdagangan yang direpresentasikan oleh volume, nilai dan frekuensi saham harian meningkat setidaknya sekitar 14%. Dari sisi volume, dari sisi value maupun dari sisi frekuensi.

Lalu tahun 2018 kita juga meluncurkan notasi khusus pada kode perusahaan tercatat. Terdapat 7 notasi yang diberikan mencerminkan kinerja, point concern dan compliance perusahaan tercatat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proteksi investor pada saat pengambilan keputusan investasi. Saat ini notasi khusus yang menempel pada masing-masing kode perusahaan tercatat dapat dilihat di website Bursa efek Indonesia serta beberapa online treading anggota bursa. Rule out implementasi notasi khusus ini masih kami jalankan dan ditargetkan pada seluruh sistem online treading anggota bursa kita. Ini adalah untuk investor protection, jadi untuk membeli saham ada *alert* untuk investor notasi-notasi khusus apabila ada misalkan keterlambatan laporan itu ada kodenya khusus, ada equitas negative ada kodenya khusus, itu ada 7 notasi khusus yang kita berikan.

Kemudian untuk meningkatkan basis layanan investor serta menurunkan *barrier of entry* bagi calon investor yang secara geografis sudah dijangkau. KSEI dalam hal ini mengimplementasi, simplifikasi pembukaan rekening efek yang telah diluncurkan pada tanggal 28 November 2019 yang lalu. Sekarang pembukaan rekening untuk dapat berinvestasi di Indonesia dapat dilakukan dalam kurang lebih 2 jam yang sebelumnya proses tersebut membutuhkan waktu 7 atau bahkan bisa sampai 2 minggu.

Ini adalah jaringan distribusi pasar modal Indonesia. Untuk memperluas jangkauan pasar modal Indonesia kami telah berupaya untuk memperluas jaringan seperti menempatkan kantor perwakilan di kota besar, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi untuk mendirikan gallery investasi dan saat ini sudah terdapat 29 perwakilan, 422 investment gallery. Kita juga punya TV seperti yang tadi saya katakan IDX Channel serta kita memiliki komunitas investasi sejumlah 446 komunitas.

Ini adalah rata-rata aktifiats perdagangan pertumbuhan kapitalisasi pasar, kita bisa lihat dari tahun 2012 bahwa *daily trading value* itu meningkat 37,77% per ... lalu untuk *daily number of trade* atau frekuensinya itu meningkat cukup signifikan dari 2012 itu 121 ribu kali, saat ini sudah mencapai 431 ribu kali, yaitu yang tertinggi di Asia saat ini. Lalu untuk RNTH atau *treading turn over* itu meningkat cukup signifikan dari 2012 4.500 triliun saat ini per 2019 sudah mencapai hampir 10 triliun dan juga market kapitalisasi naiknya cukup signifikan 7% dari 4 triliun menjadi 7.072 di tahun 2019.

Ini adalah jumlah dan nilai *fund risk* pencatatan saham baru bisa kita lihat bahwasanya tahun 2018 itu merupakan tahun yang luar biasa mencapai 57 *listed company* pada saat 2018. Kalau kita lihat dari slide tersebut itu adalah yang tertinggi sejak swastanisasi 1992. Jadi 2018 adalah recor high untuk *company listing*.

Kita bisa lihat juga dari jumlah investor kenaikan cukup luar biasa, 2017 jumlah investor pasar modal itu adalah 1,1 juta. 2018 kenaikan 44% menjadi 1,6 juta. Dimana untuk SID yaitu saham itu yang sebelumnya 2017 630 ribu, 2018 sudah mencapai 854. Lalu kalau kita lihat dari 2018 menjadi 2019 pertumbuhan jumlah investor pasar modal itu sudah mencapai 1,9 juta diharapkan sebentar lagi bisa mencapai 2 juta. Untuk SID untuk saham itu sudah mencapai 952 sedikit lagi sudah menembus 1 SID saham-saham.

Ini adalah demografi investor individu, bisa kita lihat bahwasanya mayoritas saat ini adalah milenial, usianya itu sekitar 30 tahun itu merupakan 40% dari investor kita. Jadi investor kita 40% itu adalah di usia-usia milenial. Kalau kita jumlahkan antara 30 dan 40 itu sudah mayoritas sudah lebih dari 50%. Kalau kita lihat dari penghasilan

kita bisa lihat disitu bahwasanya yang bermain di pasar retail kita itu antara income 10 sampai 100 juta, itu merupakan 57,3%.

Ini adalah persebaran investor pasar modal Indonesia kita bisa lihat bahwasanya saat ini memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang kedua adalah Sumatera, yang ketiga adalah Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan yang terakhir adalah Maluku. Yang menarik dalam hal ini bahwasanya Jawa itu sebetulnya sebelum-sebelumnya sebelum tahun 2018 itu mencapai 75%. Namun, sedikit demi sedikit mulai berkurang karena daerah-daerah itu mulai menunjukkan peningkatan untuk masuk di pasar modal juga, sehingga saat ini sudah untuk Pulau Jawa 72,8%.

Ini adalah komposisi kepemilikan dan aktifitas transaksi investor, kita bisa lihat bahwasanya per 19 Mei 2018 kita lihat bahwasanya investor domestik itu 48,5% dan investor foreign itu 51,9% ini dari kepemilikan saham strip plus di KSEI. Namun, kalau kita lihat dari slide yang di bawahnya kita lihat bahwa aktifitas transaksi itu sudah didominasi oleh investor domestik. Untuk sampai bulan Mei 2019 investor domestik sudah mencapai 65,5% sementara untuk foreign-nya 34,5%.

Ini adalah aktifitas transaksi investor asing dan pergerakan Rupiah bisa kita lihat bahwasanya dari 2003 sampai 2019 terlihat cukup bagus dan kalau kita konsentrasikan di 2019 masih ada terdapat *capital inflow* sebesar 56,9 miliar US Dolar. Walaupun ada beberapa bulan-bulan *capital out flow* tapi secara keseluruhan masih positif 56,98.

Kalau kita lihat dari kinerja perusahaan tercatat kita lihat bahwasanya kita gabungkan semua *all list the company* masih menunjukkan *growth* yang cukup bagus. Dari sisi total aset kita bisa lihat bahwasanya per Maret 2018 itu adalah 10.156 triliun itu menjadi 11.210 triliun itu ada *growth* sekitar 10,38%. Demikian pula dari *equity* juga *growth* 11,31 dan *revenue* juga *growth* 4,13 dan profit juga kita lihat masih *growth* 8,86%.

Ini adalah perbandingan pasar modal di Asian, kalau kita lihat dari kapitalisasi pasar kita ada di urutan ketiga dibandingkan Singapura dan Thailand. Kita pernah di urutan kedua namun karena pelemahan Rupiah jadi kita turun ke ranking 3. Kalau dari sisi perusahaan tercatat kita di urutan keempat, Indonesia saat ini per kemarin 633, tapi di atasnya adalah Thailand, Singapura dan Malaysia. Dan untuk investor kalau dari sisi investornya kita juga urutan ketiga seperti tadi saya utarakan bahwasanya Indonesia itu 950 sementara Thailand 1,1 juta dan Malaysia 1,4 juta investor.

Ini hal yang menarik perkembangan pasar modal di Asian bahwasanya Indonesia itu perkembangan perusahaan tercatatnya yang terbaik diantara Asean. Kita lihat sebelah kiri Malaysia itu cukup stagnan pertumbuhannya hanya 1%, kalau Singapura malah kita lihat negative turun minus 4,5%. Yang bisa mengimbangi kita adalah Vietnam sekitar 23% itu kalau dari sisi perusahaan tercatat. Kalau kita lihat dari rata-rata frekuensi transaksi saham harian kita lihat bahwasanya per April 2019 kita yang tertinggi di Asean. Kalau kita lihat di 2017 Thailand masih nomor satu, namun setelah 2018 apalagi setelah mencanangkan *settlement T+2* kita *lead* melampaui Thailand, Malaysia, Philipina dan Vietnam.

Ini adalah strategi jangka panjang BEI 2016-2020.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Untuk terus mendukung pengembangan pasar modal Indonesia kepada depan BEI telah menetapkan serangkaian tujuan dan strategi pengembangan ke depan sebagaimana tertuang dalam RSYPP BEI tahun 2016-2020. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, BEI beraspirasi menjadi pusat penyelenggara perdagangan efek yang terpercaya dan mendukung pendalaman pasar modal Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini BEI telah menetapkan strateginya yaitu bagaimana membangun bursa efek yang inklusif, berdaya saing dan mempromosikan tata kelola untuk terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Strategi ini dapat diterapkan pada 4 area pengembangan, yaitu peningkatan jumlah dan partisipasi investor, peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat, peningkatan kapasitas Anggota bursa dan perluasan partisipan dan pengembangan dan optimalisasi infrastruktur ke bursa.

Berikut ini adalah beberapa fokus pengembangan pasar oleh bursa yang mana akan turut melibatkan seluruh pelaku industri pasar modal serta koordinasi yang erat dengan OJK. Beberapa fokus pengembangan ini yaitu meliputi pengembangan produk derivatif, yaitu *indeks future, single stock future, structure war*, serta diperkuat dengan dukungan *securities landing and borrowing* skema minjam meminjam efek.

Pada sisi lain BEI bersama SRO saat ini sedang fokus pada pengembangan platform perdagangan surat utang di bursa, sehingga mampu mengakomodasi pengembangan pasar modal Indonesia. Lalu kemudian kami juga melakukan perluasan penguatan proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia yang kami kembangkan melalui penawaran umum secara elektronik, EIPO serta registrasi penawaran umum dan pencatatan perusahaan secara elektronik atau e-registration serta registrasi penawaran umum dan pencatatan perusahaan secara elektronik. Dan juga BEI berusaha memperluas akses penggalangan dana atau fund raising dan pencatatan saham kepada perusahaan-perusahaan UKM, startup melalui implementasi yang kami sebut dengan paparan akselerasi. Jadi paparan akselerasi ini diperuntukkan untuk small medium enterprise, UKM, dan juga untuk startup company.

Selanjutnya BEI bersama OJK juga berupaya memperluas akses investasi pasar modal di daerah melalui implementasi perusahaan efek daerah. Dan yang terakhir untuk memperkuat awareness dan perlindungan kepada investor kita mengimplementasikan notasi khusus pada akhir kode perusahaan tercatat.

Ini adalah highlight di samping kita inisiatif-inisiatif yang kita canangkan, kami juga tidak lupa untuk melaksanakan CSR di negara tercinta kita ini. Ini adalah *highlight corporate social responsibility* pasar modal Indonesia untuk 2018. Antara lain kita mengajar di SMK, lalu edukasi publik SMK Perpajakan di Riau 2018, terus bantuan pendidikan kepada siswa-siswi SD di Minahasa Utara, lalu juga kita turut aktif untuk bantuan korban di Palu, di Lombok juga, bantuan pendidikan kepada siswa-siswi di Kota Bitung, serta pada saat yang terakhir itu yang gempa di Lombok 13 Agustus 2018. Untuk dana realisasi CSR 2017 itu sekitar 2 miliar dan untuk 2018 sekitar 3 miliar.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Mungkin adalah tambahan dari Dirut KPEI dan KSEI?
Kalau ada tambahan kami persilakan untuk melengkapi paparan dari Dirut BEI.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Sementara cukup Pak, dari bursa.

KETUA RAPAT:

Cukup ya, kalau gitu lanjut ke Ketua Asosiasi Analisis Efek Indonesia.
Kami persilakan.

KETUA ASOSIASI ANALIS EFEK INDONESIA:

Selamat sore Bapak Pimpinan.

Saya sebagai juru bicaranya, ada beberapa point yang kami ingin sampaikan. Mohon maaf kami tidak menyiapkan materinya. Kami sebagai Asosiasi Analisis Efek Indonesia sudah melakukan beberapa hal Pak, terkait dengan perkembangan bursa Indonesia.

Pertama, kami juga telah melakukan sertifikasi untuk para analis dengan *best practice* ...(suara tidak jelas) jadi kita sudah menyamakan dengan *best practice international*. Kami juga sudah banyak asosiasi berkiprah di industry pasar modal dengan mengikuti kampanye saham dan juga berbagai kegiatan lain di industry pasar modal.

Di lain pihak kami juga sudah bekerja sama dengan hampir sekitar 50 perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka untuk penyelenggaraan pelatihan dan mempersiapkan para calon analisis di industry pasar modal. Lalu juga kebutuhan analisis ini cukup besar Pak, karena memang bukan hanya bagi juga perusahaan efek akan tetapi juga dengan industry keuangan lainnya, seperti dana pensiun, asuransi, pembiayaan dan perbankan. Karena kita juga perlu mengantisipasi adanya integrasi Asean, jadi kita berpikir bahwa memang kebutuhan analisis ini juga memang sangat besar bagi kebutuhan itu semua industry jasa keuangan.

Lalu juga sejak tahun 2013 Asosiasi Analisis Efek Indonesia telah membangun kompetensi analis dan hampir sekitar 1000 orang sudah mengikuti kompetisi tersebut. Tapi kami merasa mungkin belum cukup karena memang kebutuhan daripada industry juga masih sangat-sangat besar sekali.

Lalu juga AAEI juga telah berperan mempersiapkan penggunaan analisis pada perusahaan startup di Indonesia khususnya Fintech yang saat ini sudah mulai menggeliat. Lalu juga AAEI saat ini juga sudah menjadi salah satu ujung tombak bagi *stake holder* dalam rangka pertumbuhan komunikasi industry perusahaan, sosialisasi, edukasi sehingga tepat sasaran.

Lalu juga yang mungkin perlu juga dicermati disini adalah AAEL juga sekarang sudah mempunyai standart nasional Pak, langsung di bawah Presiden. Sehingga analisis-analisis yang ada sekarang di Indonesia sudah bersertifikat langsung dari Presiden.

Itu mungkin beberapa point yang perlu kita sampaikan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut ke Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.

KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Bapak-bapak Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Bapak-bapak Ketua Asosiasi dari Bursa Efek, APPI, dan AAJI,
Yang terhormat Bapak-bapak semua yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat
siang hari ini.**

Baik Pak, saya akan coba urai sedikit mengenai asuransi di Indonesia ini. saya jelaskan sedikit mengenai market structure perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Sampai dengan 2017 ini perusahaan asuransi jiwa ada 59 perusahaan, perusahaan asuransi umum ada 76 perusahaan, perusahaan reasuransi ada 6, kemudian perusahaan social security atau yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja ada 2, kemudian perusahaan-perusahaan asuransi yang terkait dengan Asabri, Taspen dan seterusnya ada 3 perusahaan.

Next, Berdasarkan kepemilikannya saat ini perusahaan asuransi jiwa dimiliki oleh asuransi umum ada 1 dimiliki oleh negara ada 1, kemudian private 36, joint venture atau kepemilikannya ada asing 22 perusahaan. Dari asuransi umum ada 2 perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, ada 53 perusahaan yang private dan ada 21 yang joint venture. Perusahaan reasuransi ada satu yang BUMN, kemudian 5 adalah perusahaan asuransi umum biasa.

Next, berdasarkan *supporting services* ini adalah usaha-usaha pendukung asuransi ada pialang asuransi sehingga tahun 2017 kemarin ada 168 perusahaan pialang asuransi dan ada 43 perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian ada 27 perusahaan.

Next, aset dari perusahaan asuransi, industry asuransi secara keseluruhan hingga tahun 2017 kemarin ada kurang lebih sekitar 1.100 triliun asetnya. Dan kalau kita lihat komposisinya perusahaan asuransi jiwa adalah yang terbesar hingga 512 triliun komposisi asetnya. Sedangkan asuransi umum ada 127 triliun, reasuransi ada 18 triliun, kemudian asuransi sosial kurang lebih 340 dan mandatory asuransi atau asuransi yang wajib....(suara tidak jelas)

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Ijin Pimpinan.

Pak, Bapak punya materi yang bisa dibagikan kepada kami Pak?

KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA:

Ada Ibu, bisa nanti dibagikan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Nanti ya.

KETUA RAPAT:

Setelah paparan nanti dibagikan.

KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA:

Iya.

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

KETUA ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA:

Baik, saya lanjutkan.

Next, berdasarkan investasi portofolio investasi di industry perasuransian paling besar adalah tetap di asuransi jiwa investasinya diikuti oleh perusahaan asuransi umum, kemudian reasuransi, dan kemudian yang terbesar berikutnya adalah asuransi sosial, dan asuransi wajib. Secara portofolio digambarkan bahwa government bond itu mencapai 25%, kemudian(suara tidak jelas) deposit kurang lebih 14%, stock market kurang lebih 22%, dan mutual fund atau Reksa Dana sekitar 23%.

Next, gross venue againsts, gross claim kita lihat secara industry sampai tahun 2017 kemarin gross premi secara industry secara keseluruhan mencapai 393 triliun, sedangkan claim-nya mencapai 297 triliun. Sebelah kanan adalah gross premi untuk yang non life saja atau asuransi umum saja, preminya mencapai 67 triliun dan claim-nya mencapai 33 triliun.

Next, ini adalah penetrasi densitas asuransi secara umum semuanya pertumbuhan daripada penetrasi asuransi kita bisa kita dari tahun ke tahun masih dikisaran dua koma sekian persen. Sedangkan densitas asuransi per kapita per tahun meningkat dari tahun 2014 di bawah 1 juta, saat ini tahun 2018 kemarin terakhir sudah mencapai 1,5 juta.

Next, sekarang kita meningkat kepada khusus hanya asuransi umum saja sampai dengan tahun 2018. Secara premi bruto meningkat kurang lebih 10%, kemudian kalau kita lihat disini ada kita berikutnya hasil investasi turun justru kurang

lebih 8%, laba usaha asuransi dengan demikian juga turun sekitar 1%. Aset meningkat sekitar 11% dan modal sendiri meningkat kurang lebih 6,4%.

Next, premi terhadap claim bruto kita lihat bahwa *alhamdulillah* di tahun 2018 kemarin peningkatan premi bruto masih lebih besar daripada peningkatan claim bruto. Di mana premi brutonya meningkat 5,6 triliun sedangkan claim brutonya meningkat kurang lebih 2,1 triliun.

Next, ratio claim bruto hingga tahun 2018 kemarin kalau kita bandingkan antara premi bruto terhadap claim bruto selama kurang lebih 3 tahun terakhir dimana angkanya di atas 50% di tahun 2018 kemarin turun sedikit dari 50% mencapai 49%.

Next, hasil operasional ini menggambarkan bagaimana perusahaan bisa secara operasi atau hasil under rating-nya harus mampu menutupi beban usaha dari perusahaan. Kalau kita lihat di tahun 2018 dari 14,5 triliun kemudian beban usahanya adalah 12,5 sehingga hasil operasional mencapai kurang lebih 1,9 triliun. Kalau kita lihat di beberapa tahun belakangan *alhamdulillah* tahun 2018 kemarin meningkat lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017.

Next, dari jumlah investasi yang bisa dikumpulkan di perusahaan asuransi umum tahun 2018 mencapai 72,8 triliun dan hasil investasinya 4,5 triliun dan investment years yang kita peroleh tahun 2018 turun dibandingkan 3 tahun terakhir dimana 3 tahun terakhir mencapai di atas 7%. Sedangkan di tahun 2018 kemarin turun menjadi 6,3%.

Next, portofolio investasi memang masih tetap yang paling besar kalau kita lihat persentase di sebelah kanan tahun 2018 itu adalah tetap time deposit di asuransi umum. Sedangkan yang meningkat terus adalah Reksadana dari 14% tahun 2018 sekarang ini sudah mencapai 22%. *Next*, ini adalah perkembangan aset perusahaan asuransi umum dari tahun 2018 kemarin sudah mencapai 146 triliun atau meningkat 11% dibandingkan dengan tahun 2017.

Next, capital productifity ini adalah perbandingan antara modal sendiri terhadap premi bruto yang bisa dihasilkan dari modal sendiri ini dari tahun ke tahun, tahun 2014 120% kemudian turun menjadi 115%, turun lagi menjadi 113%, tahun 2017 kemarin turun menjadi 106% dan tahun 2018 kembali naik menjadi 110%. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kembali meningkat.

Next, perusahaan asuransi umum ini dari lini usaha atau per cluster bisnisnya kita bisa lihat. Bahwa kita lihat dari total 69 triliun dari produksi premi tahun 2018 kurang lebih 18 triliun sampai 16 triliun itu diperoleh dari harta benda dan kendaraan.

Jadi secara portofolio kedua lini usaha ini harta benda dan kendaraan adalah yang terbesar. Kalau kita lihat ininya portofolio kendaraan dan harta benda itu mencapai masing-masing 26,7% atau 27% tahun 2018 ini. Kedua lini usaha ini adalah yang terbesar. *Next*, kontribusi claim-nya juga demikian. Kedua lini usaha tadi kendaraan motor dan harta benda itu mencapai 26% dan 21% diikuti oleh kredit dan kesehatan.

Bagaimana dengan tahun 2019 di triwulan I tahun 2019 angkanya menggambarkan bahwa kuartal I tahun 2019 itu meningkat kurang lebih 19% dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018. Dan peningkatan terjadi juga di kelas usaha harta benda kurang lebih 26%, sedangkan dari kendaraan motor turun 1%. Dari peningkatan claim brutonya juga di harta benda atau property meningkat 61% sedangkan di kendaraan motor meningkat 3,1%.

Next, secara ratio claim kuartal I tahun 2019 mencapai 42% atau meningkat sedikit dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018 sebesar 76%.... **(rekaman terputus)** ... di pangsa pasar asuransi umum. *Next*, kontribusi claim-nya juga demikian, property dan motor masih yang terbesar diikuti oleh asuransi kredit dan asuransi kesehatan.

Demikian paparan yang dapat saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.

Terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Lanjut, Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

KETUA ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA:

Baik, terima kasih Bapak.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat,
Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Para hadirin yang saya banggakan.**

Ijin menyampaikan....(suara tidak jelas)

F-PG (MUKHAMAD MISBAKHUN):

Saya interupsi Pak.

Kita mengundang ini dalam rangka SRO dan kemudian asuransi dalam rangka kita mau menuju rapat membahas laporan kinerja triwulan OJK Pak. Jadi kita bukan ingin mendengarkan Bapak-bapak itu seperti apa, iya itu penting. Tapi saya ingin tahu apa penilaian Bapak-bapak dalam kinerja OJK ini dalam triwulan sebagai industry keuangan non bank dan bursa efek dan SRO-nya di dalam pengawasannya OJK. Kita ingin tahu, jadi kita ingin mendapatkan masukan dari Bapak-bapak mengenai bagaimana OJK dan bagaimana cara kerja OJK terhadap industry.

Kita ingin tahu apakah Bapak-bapak dielus-elus, ditamparin, digebukan atau diapain kita ingin tahu. Jadi kalau Bapak-bapak lapor yang seperti itu iya, tapi tolong ditambahkan dengan yang apa yang sampaikan, bahwa misalnya contoh iurannya OJK ini seperti apa membebani industry atau tidak, pengawasannya itu mengena atau tidak, atau pengawasannya hanya minggir-minggir melipir, diajak kolusi sama Bapak-bapak mau gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut, silakan Pak.

KETUA ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA:

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Ijin menyampaikan beberapa data yang ingin kami share dengan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI terkait dengan kinerja Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia selama 5 tahun terakhir Pak.

Jadi dari sisi jumlah perusahaan Pak, ternyata industry asuransi jiwa ini masih terus diminati. Jumlah perusahaan asuransi jiwa meningkat 2014 sebanyak 51 dan tahun 2018 sebanyak 60, jadi terjadi peningkatan 9 perusahaan dari hampir 50-an hampir 18% Pak. Di mana tetap didominasi secara jumlah perusahaan oleh perusahaan nasional, perusahaan domestik, sementara perusahaan joint venture-nya patungannya sebanyak 24.

Next, secara pendapatan dan total claim, memang ada tahun yang di mana pendapatan naiknya cukup signifikan, ada tahun yang agak turun Pak. Tapi *over all* kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini Bapak-bapak, pendapatan itu tumbuh dari 166 triliun menjadi 204 triliun atau peningkatan itu sebanyak 5,3%. Adapun pembayaran claim yang ditunggu-tunggu oleh nasabah itu juga terjadi peningkatan sebesar 12,5% per tahunnya.

Next, secara total aset, total aset per 2018 akhir tahun Bapak, itu sebesar 517 triliun. Dari 517 triliun yang diinvestasikan itu 461 triliun, dari 461 triliun ini sebanyak 373 triliun itu dalam bentuk cadangan teknis guna memenuhi kewajiban perusahaan asuransi jiwa di masa mendatang kepada para pemegang polis-nya.

Next, di mana perusahaan asuransi jiwa pada umumnya berinvestasi. Agak sedikit berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Pak, kalau asuransi jiwa mengingat kontraknya adalah jangka panjang, maka investasinya juga lebih banyak didorong pada instrument jangka panjang. Salah satunya adalah Reksadana begitu Bapak-bapak kemudian juga ada surat berharga negara. tetapi belakangan ini karena minat pemegang polis unit link kita cukup tinggi pada pasar saham maka porsi sahamnya cukup signifikan Bapak dan Ibu semuanya. Deposito tetap ada Bapak dan Ibu sebanyak 39 atau hampir 40 triliun pada posisi akhir tahun 2018.

Next, jumlah karyawan kira-kira sekita 23 ribuan dari sekitar 60 perusahaan asuransi jiwa Bapak dan Ibu semuanya. *Next*, adapun tenaga pemasarnya Bapak dan Ibu posisi akhir tahun 2018 itu sebanyak hampir 600 ribu tenaga pemasar industry asuransi jiwa. Terjadi peningkatan dari 5 tahun sebelumnya yang hanya sekitar 400 ribu, jadi meningkatnya dari sedikit di atas 400 ribu menjadi sedikit di bawah 600 ribu hampir 50%.

Next, bagaimana dengan jumlah tertanggungnya. Jumlah tertanggungnya kami coba bedakan Bapak dan Ibu, tertanggung polis-polis individual, tertanggung polis-polis perorangan dan tertanggung secara polis-polis kumpulan. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat, maka jumlah tertanggung polis-polis asuransi jiwa yang individual itu cenderung meningkat dari 15 jutaan di tahun 2014 menjadi hampir 18 juta polis di akhir tahun 2018. Untuk polis-polis kumpulan terjadi sedikit penurunan dari 40 jutaan menjadi 36 juta.

Adapun preminya itu juga menunjukkan pertumbuhan positif meskipun tahun 2018 terjadi penurunan sedikit. Tetapi kalau kita ukur pertumbuhan dari tahun 2014 ke tahun 2018, 5 tahun kegunaannya Bapak dan Ibu adalah sebesar 11,4%. *Next*, yang berikutnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu disini adalah mengenai penetrasi asuransi jiwa. Kalau secara proporsi premi asuransi jiwa terhadap PDB kita Bapak dan Ibu itu belum banyak bergerak masih disekitar satu koma sekian persen, dari 1,1% 5 tahun yang lalu menjadi 1,3%. Kalau secara jumlah tertanggung terhadap penduduk Indonesia terjadi peningkatan dari sekitar 6% tahun 2014 menjadi 6,7% tahun 2018 akhir.

Next, mungkin sedikit pemikiran, sedikit usulan terhadap dari industry asuransi jiwa Bapak dan Ibu, yaitu adalah kami percaya kenapa jumlah tertanggung belum banyak meningkat, kenapa belum semakin banyak masyarakat Indonesia yang membeli polis proteksi asuransi jiwa, salah satunya adalah bahwa cara-cara memasarkan industry asuransi jiwa sampai dengan saat ini Bapak dan Ibu, itu masih didominasi oleh channel-channel yang sudah berpuluh atau belasan tahun ada, dua diantaranya yang paling besar adalah agency dan bancassurance, beberapa Anggota asosiasi asuransi jiwa mulai membuka, mulai menjalankan apa yang disebut insure tax bagaimana bisa berjualan asuransi dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah sangat meluas, tetapi masih ada sedikit hambatan sehingga ini masih belum bisa massal dilaksanakan Bapak dan Ibu. Yang pertama, tentunya adalah kemudahan untuk mendapatkan data dari Dukcapil, itu sekarang kerja samanya sudah terjalin Bapak dan Ibu, tetapi mungkin belum menjawab harapan industry. Kemudian yang kedua, masih wajibnya penggunaan tandatangan basah, sudah ada beberapa usulan supaya ini bisa digantikan secara elektronik akan tetapi masih menunggu keputusan akhir dari semua pihak terkait termasuk regulator. Tentunya ada harapan mengenai pajak investasi, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu kalau di bank sudah ada LPS dari beberapa tahun sebelumnya sempat ada wacana mengenai bagaimana kalau ada perlindungan juga terhadap pemegang polis asuransi tetapi sampai saat ini belum mengerucut lebih jauh.

Bapak dan Ibu.

Yang terakhir adalah bagaimana kampanye nasional agar *awareness* kesadaran untuk berasuransi itu semakin meningkat. Kemudian ada juga isu akan tetapi tidak untuk hari ini Bapak dan Ibu mengenai ada standart akuntansi keuangan yang baru yang nantinya akan diterapkan secara internasional. Dan ini sedikit banyaknya akan bisa mengubah wajah industry asuransi di Indonesia. Yang terakhir masih perlu ada harmonisasi sedikit di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang perlu diseleraskan dengan POJK Perlindungan Konsumen.

Rasanya itu masukan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu yang terhormat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Lanjut Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

KETUA ASOSIASI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INDONESIA:

**Yang kami hormati Bapak Soepriyatno selaku Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang kami hormati Dirut Bursa Efek Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati para Dirut dari perangkat Bursa Efek,
Yang kami hormati dari Dirut dari AAEI,
Yang kami hormati rekan saya Ketua AAUI dan AAJI,
Hadirin yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama iijinkan saya untuk membawakan materi perkembangan industry pembiayaan. Industri pembiayaan kalau di masyarakat lebih dikenal dengan mungkin *leasing*. Ini memang sudah ada cukup lama sejak tahun 1995, tetapi kalau masyarakat selalu mengatakan *leasing* lebih sangat dikenal.

Nah, perkembangan industry pembiayaan sangat baik sejak krisis 98 atau di awal tahun 2000. Pertumbuhan perusahaan pembiayaan pernah mencapai sampai dengan 203 perusahaan pada tahun 2015. Namun demikian, sejak tahun 2015 kami mengalami tekanan pertumbuhan. Tekanan pertumbuhan kami adalah di bawah double digit, yang di mana pertumbuhan sejak tahun 2000 sampai dengan 2012 boleh dikatakan *compound annual growth rate* kami dikisaran sekitar 25-30%, 20-25%. Kalau kita bisa lihat mungkin di awal-awal tahun 2000 sampai 2011 penjualan mobil roda empat, roda dua, sangat-sangat baik dan dominasi dari portofolio pembiayaan atau perusahaan pembiayaan banyaknya di roda empat dan roda dua. Setelah roda empat dan roda dua perusahaan pembiayaan sangat dominan juga membiayai alat berat.

Lanjut slide dua, kita mengalami tekanan kurang lebih 4 tahun terakhir di mana sejak OJK mengawasi dan mengatur perusahaan pembiayaan pada tahun 2013, portofolio kami berubah. Di mana dari sisi kegiatan yang tadinya adalah sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, factoring dan credit card menjadi pembiayaan investasi modal kerja multi guna. Ini sangat baik inisiasi yang disampaikan oleh OJK pada industry agar pembiayaan kita lebih umum tidak spesifik kepada pembiayaan konsumen yang mungkin dikenal oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami ini sangat lebih dikenal dominan di pembiayaan roda empat dan roda dua, sehingga banyak sedikit cerita-cerita yang tentang dept collector pada waktu itu. Ini sudah kita benahi bersama-sama OJK di mana para dept collector saat ini atau tenaga ahli daya sudah kami sertifikasi agar lebih baik dan lebih sopan di dalam penagihan. Walaupun 1, 2 tenaga ahli daya ini masih ada juga berita-berita yang misalnya menarik dengan tidak sopan atau mungkin menarik dengan tidak baik.

Terkait dengan komposisi pembiayaan investasi modal kerja dan multi guna, di mana pembiayaan roda empat dan roda dua tetap ada di dalam pembiayaan multi guna dan kalau kita lihat portofolionya dari slide yang ada di depan ini, pembiayaan multi guna yang terdiri dari roda empat dan roda dua serta sedikit elektronik financing 60% atau 63% portofolio-nya. Selanjutnya pembiayaan investasi banyak didominasi

oleh pembiayaan alat berat yang terdiri dari kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 32%, sisanya masuk di pembiayaan modal kerja serta pembiayaan-pembiayaan lain yang disetujui oleh OJK.

Dari peraturan OJK yang sudah diterbitkan oleh OJK pada tahun 2014, POJK 28, 29, 30, 31, memberi ruang pada perusahaan pembiayaan. Jika ingin melakukan pembiayaan-pembiayaan lain di luar pembiayaan investasi modal kerja dan multi guna kami dapat mengajukan kepada OJK dan jika disetujui setiap perusahaan bisa menjalankan sesuai dengan kreatifitas dari setiap perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan 4 tahun terakhir kami masih di level 5, 7, 8%. Year on year sampai dengan April atau mungkin kuartal pertama tahun 2019 pertumbuhan kami tertekan, yaitu di bawah 5% sampai dengan Maret masih di atas 5% dan April turun kembali 4,38%. Ini sejalan seiring dengan portofolio kami yang memang didominasi oleh pembiayaan roda empat dan roda dua.

Roda empat sampai dengan April penjualan kendaraan mobil baru kurang lebih sekitar 400 ribu. Ini masih mengalami tekanan year on year 15% dibandingkan tahun 2018. Penyebab daripada penurunan penjualan roda empat baru ini kami juga berdiskusi dengan ATPM-ATPM besar, seperti Astra, Indo Mobil dari masukan-masukan yang didapat dari para ATPM tersebut daya beli memang mempengaruhi dan penjualan kendaraan roda empat lebih didominasi kepada penjuala-penjualan mobil-mobil LCJC. Kelas-kelas yang atas agak menurun, ini yang menjadi tantangan juga buat para pelaku penjual industry roda empat.

Roda dua mengalami kenaikan yang cukup baik kurang lebih sekitar 15%. Dari sisi value tentunya roda empat mempunyai value yang lebih tinggi. Penyebab dari turunnya penjualan kendaraan roda empat ini tentunya mempengaruhi kinerja daripada industry kendaraan.

Untuk alat berat kita mengalami kesuksesan yang cukup baik, setelah mengalami kesulitan daripada penjualan alat berat sejak komoditi jatuh di tahun 2012, namun di tahun 2017-2018 kenaikan penjualan alat berat sangat-sangat tinggi lebih dari 50%. Namun, terjadi koreksi di tahun ini yang diperkirakan kemungkinan tahun ini akan turun 15% sama dengan kendaraan roda empat.

Di tengah-tengah sulitnya kita bertumpu di bawah double digit, namun kalau kita lihat pencapaian daripada laba perusahaan pembiayaan cukup baik, yaitu kurang lebih sekitar 14,95% atau 15%. 3 tahun terakhir kami menciptakan laba secara industry dengan sangat baik, walaupun tekanan-tekanan yang ada di industry pembiayaan seperti Bapak dan Ibu mungkin juga membaca di koran atau mendengar beberapa perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan atau mungkin ada juga yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas atau melanggar *good corporate governance* seperti kasus SNP, kasus beberapa perusahaan pembiayaan juga yang masuk ke dalam PKPU itulah penyebab perusahaan pembiayaan saat ini tinggal 183 perusahaan.

Tekanan daripada pertumbuhan juga kami alami dimana pinjaman dalam negeri atau likuiditas untuk perusahaan pembiayaan sangat ketat, dimana pada saat pembiayaan beberapa Anggota-Anggota kami mengalami PKPU mengalami kesulitan atau melaksanakan aktifitas perusahaannya dengan tidak melakukan *good corporate governance* mempengaruhi kinerja industry. Di mana perbankan pada saat ini sangat hati-hati kepada kami dan kami sudah berkoordinasi dengan regulator kami untuk berbicara dengan pengawas di perbankan. Karena darah kami adalah dana, jika kami

tidak mendapatkan pinjaman dana tentu kami tidak bisa bertumbuh. Namun demikian, kita lihat pinjaman luar negeri meningkat sangat pesat.

Untuk perusahaan-perusahaan pembiayaan yang besar atau menengah besar masih bisa mendapatkan dana dari luar negeri, karena bank-bank di luar negeri masih percaya bahwa kami mempunyai pangsa pasar yang besar dan kami bisa tumbuh. Jadi ada ketimpangan pertumbuhan disini, pertumbuhan ini diciptakan oleh sebagian besar atau sebagian kecil dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan pembiayaan namun perusahaan-perusahaan yang menengah dan kecil saat ini sangat-sangat sulit dalam mendapatkan dana khususnya karena tidak bisa keluar negeri, dari dalam negeri sangat sulit.

Apa yang dilakukan oleh industry kami melakukan pembuatan aplikasi yang namanya aset registry agar perbankan bisa kembali percaya kepada kami. Praktek-praktek double financing, triple financing ini kita harapkan sudah tidak akan terjadi lagi apabila aplikasi aset registry ini dijalankan bersama-sama oleh seluruh Anggota perusahaan pembiayaan. Nomor rangka, nomor mesin kami catat, dan nomor rangka dan nomor mesin ini yang dijaminan oleh perbankan tidak bisa dijaminan dua atau tiga kali. Nah, saat ini sedang berjalan aplikasinya mudah-mudahan sampai akhir tahun ini semua sudah didata dan perbankan juga kami ajak untuk aktif dan berpartisipasi di dalam aplikasi aset register ini. Ini sedang berjalan dari kami di industry seluruh pengurus industry, pengurus asosiasi sedang berkomunikasi dengan OJK perbankan dan dibantu oleh OJK industry keuangan non bank.

Next, kalau kita lihat dari sisi ratio atau tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan ditengah-tengahnya tertekannya pertumbuhan industry, ratio secara industry yang diatur oleh regulator yaitu 10 kali kami masih dikisaran 2,8 kali atau dikisaran 3 kali masih sangat jauh di bawah batasan atau rambu-rambu yang diberikan oleh OJK. Financing to asset ratio, minimum 40% kami dikisaran 87% sudah jauh di atas minimum requirement.

Non performance financing kami juga sudah sangat baik gross NPL kami dikisaran sekitar 2,76% atau masih dibawah 3%. Return non asset dikisaran 4,7% dan return non equity 14,65% serta beban operasional dibagi pendapatan operasional masih kisaran dibawah 80%.

Industry pembiayaan atau perusahaan pembiayaan sangat padat karya, bahkan kalau dari jumlah cabang dari 183 perusahaan yang ada saat ini jumlah cabang sebaran di seluruh wilayah NKRI kurang lebih ada sekitar 4.300 cabang. Di mana 65% ada di Pulau Jawa dan kedua di Sumatera, selanjutnya Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dan yang terakhir ada di Pulau Kalimantan. Belum tersebar dengan rata, kenapa penyebabnya tentu kita masih mengikuti penjualan roda empat dan roda dua juga masih besarnya di Pulau Jawa dan Sumatera.

Karyawan yang bekerja di industry perusahaan pembiayaan totalnya kurang lebih 223 ribu. Di mana dari 223 ribu tersebut 117 ribu karyawan merupakan pegawai tetap, 87 ribu karyawan merupakan pegawai kontrak dan sisanya adalah outsourcing sebesar 19.724 karyawan.

Dari komposisi-komposisi pembiayaan tersebut yang ada, kami selalu berusaha dan berdiskusi dengan pengawas industry keuangan non bank bahkan pada akhir tahun 2018 POJK 35 tahun 2018 kembali dikeluarkan sebagai pengganti POJK 29 tahun 2014 terkait aktifitas kegiatan perusahaan pembiayaan. Di mana OJK mengeluarkan peraturan yang baru banyak rambu-rambu untuk kita tentu saya selalu

mengatakan kepada Anggota akibat kelesan atau kesalahan-kesalahan perusahaan pembiayaan ada rambu-rambu yang diperketat, namun juga ada yang diperbaiki untuk industri kita tumbuh. Antara lain mungkin sering kita dengar atau banyak komentar-komentar terkait dengan uang muka 0%. Terkait uang muka 0% tidak diberikan kepada seluruh Anggota, hanya diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang sangat sehat, yang sangat sehat saya tekankan kembali, yang mempunyai nonperforming financing di bawah 1%.

Namun demikian, tetap sangat sehat juga tidak serta merta membuat program-program ini sebagai program yang umum. Jika saya ditanya oleh media apakah program 0% ini akan menjadi program yang umum. Jawabannya pasti tidak, program uang muka 0% bisa dijalankan apabila misalnya ada kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan satu korporasi yang besar, yang terkenal, misalnya dia ingin memberikan fasilitas COP kepada para karyawannya, managernya, dan segalanya dimana ditanggung juga payment guarantee-nya dari perusahaan, uang muka 0% bisa dijalankan. Jadi tidak serta merta uang muka ini.

Dan untuk bagaimana kita bertumbuh tentunya kami selain berdiskusi dengan otoritas kami berdiskusi juga dengan industri kendaraan roda empat. Namun, dari masukan atau diskusi kami dapatkan dengan para pelaku penjual kendaraan roda empat dan roda dua mereka sangat merasakan tekanan ini terutama di daya beli, daya belinya sangat turun.

Hal yang kedua, yang kita diskusikan juga saat ini adanya taksi online ini mengganggu sebenarnya dalam penjualan. Karena kalau kita pahami taksi online ini mungkin buat Ibu-ibu rumah tangga juga kalau saya bicara ngapain beli mobil lagi katanya. Misalnya ada contoh, istri saya sendiri dari rumah katanya kalau ke mall hanya 6000, berapa jam bermain-main di mall kembali lagi 6000, kalau parkir jauh lebih mahal, belum lagi harus menyediakan supir. Jadi kalau dulu di setiap rumah tangga mungkin harus punya 5 mobil, karena anaknya dua dua atau tiga, sekarang tidak perlu tinggal Grab panggilan, datang. Nah, mungkin ini salah satu penyebab turunnya kendaraan. Jadi distribusi terjadi, jadi kita harus mencari peluang-peluang kemana kita harus tumbuh dan OJK juga sudah menerbitkan POJK 35 mengizinkan kita untuk pembiayaan dana atau dana tunai.

Sebenarnya pembiayaan dana-dana tunai ini terjadi juga pertanyaan-pertanyaan kok masuk dalam pembiayaan seperti ini. Ini sangat peluang sebenarnya karena data yang ada di perusahaan pembiayaan ini kurang lebih sekitar 30 juta data selama kami tumbuh dan selama kami ada di industri pembiayaan ini. 30 juta data ini sebenarnya sudah menunjukkan banyaknya nasabah-nasabah yang membayar dengan sangat baik, bisa BPKB-nya ada di kita. Bisa kita memberikan pinjaman dana kepada nasabah tersebut karena sudah ada bukti pembayaran yang sangat baik dan dana tersebut bisa dipakai untuk usaha. Contoh usaha UMKM, kami sudah mengembangkan juga pembiayaan, yaitu modal kerja UMKM.

Sedikit saya boleh cerita, yaitu di Garut. Di Garut itu ada penjahit jaket kulit, dulu menjahit hanya dapatkan income 40 ribu satu jaket kulit, sekarang sudah dibina oleh salah satu Anggota kami. Di mana para penjahit tersebut menjadi pengusaha UMKM yang tadinya hanya 80 ribu sekarang menjadi pengusaha jaket kulit yang tadinya hanya mendapatkan jasa dari menjahit sekarang dia menghasilkan produksi jaket kulit mendapatkan *income* 800 ribu satu jaket kulit. Jadi ini yang sudah kita

kembangkan bersama, jadi bersama-sama dengan b craf, kita juga mengembangkan pembiayaan UMKM dari sisi pembiayaan modal kerja.

Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan dan paparkan.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Ir. H. MARWAN CIK ASAN, M.M.):

Wa'alakum Salam.

Terima kasih Bapak-bapak yang saya hormati yang sudah menyampaikan paparannya. Sekarang jam 15.45 WIB, kita berencana menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat kita pada sore hari ini sampai jam 17.00 WIB kalau memang diperlukan kembali kita akan tambah waktunya.

Saya persilakan kepada penanya pertama dari sayab kiri Ibu Eva Kusuma Sundari.

F-PDIP (Dra. EVA KUSUMA SUNDARI):

Terima kasih Pimpinan.

Ini mengikuti orientasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Misbakhun.

Bapak-bapak yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian.

Pertanyaan saya yang pertama langsung berkaitan dengan industry asuransi Pak. apakah memang ada semacam portofolio atau semacam blue print yang sudah disiapkan oleh OJK yang kemudian dipakai oleh industry untuk melakukan pengelolaan dan juga mungkin merencanakan bisnis yang akan datang. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan tendensi dari bagaimana pun Indonesia sudah dipandang sebagai alternative dari berbagai industry terutama industry digital sudah dipindah ke Indonesia Pak, Sharp, LG, lalu apa lagi Misbakhun itu banyak sekali.

Oleh karena itu, kesiapan termasuk oleh Bursa Efek ini kira-kira seperti apa. Dan apakah hal ini sudah diantisipasi oleh OJK walaupun mengikuti prognosis perekonomian yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, termasuk BI, yang belum menampakkan kesiapan untuk mengantisipasi gelombang perpindahan industry ke Indonesia. Jadi saya melihat pergerakan ataupun dinamika lapangan lebih cepat daripada persiapan-persiapan yang selama ini sudah di-share oleh pihak-pihak tersebut, Kementerian Keuangan maupun BI, maupun Bappenas dihadapan Komisi XI DPR RI.

Jadi kira-kira bukan hanya berkaitan dengan apakah OJK selama ini sudah melakukan pendampingan, pengarahan, regulasi, mengawasi dan seterusnya akan tetapi juga apakah visinya sudah sampai kepada antisipasi peluang perkembangan bisnis yang nampaknya membaik di Indonesia dan bahkan sebagian didorong oleh trade war yang sedang berlangsung antara Amerika dan Cina. Dan ini sudah nampak bahwa ternyata itu merupakan peluang juga bukan hanya eksekusi negative yang kita terima.

Dan yang kedua berkaitan dengan asuransi, apakah kinerja ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, misalkan yang kita terima dari kinerja Bumi Putra ini menjadikan konsen dari asosiasi karena akan berimbas juga kepada tingkat kepercayaan dari masyarakat apabila ada satu pemain yang kemudian tidak performa. Dan kita menjadi agak hati-hati juga karena sudah beberapa kali rapat dengan Komisi XI DPR RI tapi nampaknya situasi tidak membaik dan bahkan mulai menjadi isu yang serius diantara para pelaku ekonomi di sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Eva.

Silakan dari kanan Bapak Misbakhun.

F-PG (MUKHAMAD MISBAKHUN):

Terima kasih Bapak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI, Kemudian para tamu kita sebagai narasumber, yaitu dari Bursa Efek, dan SRO, Kemudian dari APPI, AAUI, KSEI, dan AAJI, asuransi semuanya ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swasti Astu.

Pertama saya kepada Bursa Efek, ini ada pertanyaan saya mengenai berapa hal. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa menanyakan soal Undang-Undang Pasar Modal inikan Undang-Undang yang sudah sangat lama, 1995 ya Pak. Dengan perkembangan jaman yang ada, dan tuntutan situasi yang ada apakah Undang-Undang ini sudah cukup memadai sebagai payung hukum operasional Bursa Efek Indonesia. Karena apa? kita ingin tahu kalau kita lihat perkembangan kondisi Bursa Efek Indonesia, kalau tadi statistic yang Bapak berikan, ratio antara jumlah penduduk dan investor masih sangat kecil sekali nol koma sekian. Kemudian dari kapitalisasi pasar kita juga sebagai negara yang PDB-nya terbesar kita bukan kapitalisasi pasar, kita bukan adalah yang terbesar di Asia secara regional. Walaupun jumlah transaksi hariannya kita sudah meningkat cukup tinggi.

Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya apakah kemudian Undang-Undang ini perlu ada perubahan kalau memang seperti itu. Apa yang perlu dirubah kalau memang, karena kita ingin mengetahui dari Bapak-bapak Bursa Efek posisi Undang-Undang ini apakah juga menjadi salah satu penghambat dari misalnya orang untuk melakukan IPO, BUMN melakukan IPO dan sebagainya. Dalam rangka untuk apa? untuk memudahkan orang melakukan proses listing di bursa efek. Kemudian bagaimana pembentukan sekunder marketnya dan sebagainya. Karena apa? dengan perkembangan ekonomi yang ada, situasi pasar juga gampang berubah dan sebagainya tentu kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan.

Kemudian apalagi sekarang itu fraud semakin banyak, jenis-jenis ... di pasar modal juga semakin variative cara orang melakukan itu dan kita tahulah apakah ini sebagai sebuah fundamental pasar atau sebagai fundamental company yang bagi perusahaan disana. Ini saya perlu menanyakan kepada Bapak-bapak sekalian.

Kemudian kepada para SRO-nya, inikan juga perlu penguatan dari sisi Undang-Undang. Bagaimana kita lembaga Kustodian kita sebagai penopang dari bursa inikan juga ada penguatan. Undang-Undang ini titik lemahnya dimana dalam melakukan regulasi ini untuk melakukan upaya penguatan. Karena apa? Birokrasi itukan semakin dihindari dalam rangka orang untuk memudahkan dalam rangka melakukan. Tapi resikonya juga harus kemudian dikuatkan bagaimana resiko itu bisa dibagi dan di-*manage* dengan baik.

Saya juga ingin tahu bagaimanapun juga Bursa Efek Indonesia itu diatur oleh OJK, tapi bursa efek bukan bagian dari OJK secara structural. Nah, saya ingin mengetahui pola hubungan antara Bursa Efek Indonesia dengan OJK ini seperti apa. Pola hubungan kerjanya dalam banyak hal saya ingin mengetahui, saya ingin mengetahui secara detail seperti apa sehingga kita bisa mengetahui dengan baik bahwa OJK itu perannya seperti apa. Karena ada komisioner yang mengenai bursa di OJK. Kita ingin mengetahui karena apa? kita pernah FDG dengan OJK dan sebagainya tiba-tiba komisioner berbicara soal bagaimana dunia pasar modal kita dengan produk-produk yang lebih bervariasi misalnya KEKF dan sebagainya itu diclaim sebagai sebuah pencapaian OJK. Kalau regulasinya iya, tapi itu produk industry, produk dari pasar. Tapi bagaimana dia meningkat dan sebagainya itu adalah pilihan portofolio orang untuk menciptakan produk itu, berdasarkan resiko dan berdasarkan kebutuhan. Saya ingin mengetahui dan saya perlu melakukan pendalaman ini untuk dalam rangka itu.

Kemudian mengenai seberapa kuat kemudian aturan di bursa itu, aturannya OJK-nya seperti dan aturan bursanya seperti apa di saat ada gap antara Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK itu sendiri.

Kemudian mengenai saya geser ke asuransi, kebenaran ada yang menarik ini dari kesimpulannya asuransi jiwa. Mengenai Undang-Undang Konsumen, yang Bapak meminta disesuaikan Undang-Undang Konsumennya dengan POJK. Saya kaget ini, kalau dari hirarki struktur Undang-Undang, Undang-Undang itu yang justru harus diikuti oleh OJK dalam rangka perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK itu salah satunya adalah pengawasan dan perlindungan konsumen.

Kalau kemudian POJK-nya bertentangan dengan Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Konsumennya diminta untuk menyesuaikan saya tidak tahu. Karena apa? dari sisi hirarkis ini lebih kuat Undang-Undang daripada POJK-nya. Jadi saya jadi ingat juga ini berkaitan dengan AAUI ini, Asuransi Umum Indonesia yang tetap menerbitkan surety bond ketika surety bond itu tidak boleh diterbitkan oleh asuransi umum hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan penjaminan dan itu ada aturan POJK-nya seperti itu membolehkan, hanya berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang penjaminannya tidak membolehkan, tapi Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya menyebutkan soal produk-produk yang boleh dipakai sebagai penjaminan pada saat mendapatkan jasa konstruksi. Nah, ini menjadi catatan bagi saya bagaimana saya bisa mengetahui soal POJK mengenai perlindungan

konsumen tentang ternyata tidak *linked* dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri.

Nah, kemudian saya ingin mengetahui secara detail soal industry tadi juga mengenai pembiayaan. Saya melihat bahwa industry keuangan kita terutama asuransi apakah sudah bisa menggambarkan kalau menurut saya secara umum ini ya, baik itu asuransi secara keseluruhan. Apakah bisa menggambarkan dan bisa situasi ekonomi kita saat ini. Apakah kemudian peran dunia industry asuransi ini terhadap upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, terutama yang pembiayaan. Karena apa? orang ketika tadi Bapak bicara tentang uang muka, kita ini sejak tahun 2015 berbicara tentang *loan to value*, yang ketika dipakai oleh Bank Indonesia sebagai *policy anti cyclical* untuk meredam terjadinya bubling di dalam sektor industry itu kita sudah meminta ketika ekonominya mengalami decline harusnya dilakukan upaya relaksasi. Dan ketika gubernurnya berubah dan langsung dilakukan upaya penyusunan itu.

Kalau menurut saya inikan diserahkan oleh POJK-nya kepada industrinya masing-masing disesuaikan dengan kemudian kesehatan dan performance keuangan masing-masing industry. Kalau menurut saya ini saya ingin tahu Pak, apakah ini kemudian bisa mendorong terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi kita secara sectoral. Karena apa? pembiayaan inikan harus di-spreading Pak, ada yang melalui sektor perbankan dan kemudian seperti pembiayaan yang berasal dari tempat Bapak, yaitu leasing dan sebagainya, pembiayaan. Nah, ini yang ingin saya ketahui seberapa kuat daya dorong aturan relaksasi itu terhadap pertumbuhan industry. Karena saya lihat tadikan juga tidak signifikan sekali pengaruhnya, apakah terlambat, kita melambat karena apa? relaksasi itukan kalau kemudian timing-nya tidak tepat kan juga percuma saja.

Itu yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Silakan Bapak Heri Gunawan.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN):

**Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Bapak dan Ibu pelaku industry yang saya hormati.**

Rasanya sangat menarik pembicaraan kali ini, kenapa kita bicara seperti itu? karena baru-baru ini ada kerangka ekonomi makro terkait APBN yang diajukan oleh ... **(rekaman terputus)** ... dimana periode sebelumnya kita nyaris tidak pernah

melibatkan OJK. Biasanya kita melibatkan Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Keuangan itu sendiri.

Namun, dalam masa sidang kali ini kita coba suarakan untuk kita undang OJK. Kita undang OJK, kita ingin tahu apa langkah-langkah yang akan OJK lakukan terkait dengan masalah APBN yang menurut Pemerintah itu akan bertumbuh diantara 5,3 sampai dengan 5,6%. Dengan angka kurang lebih di 2.400 triliun.

Dari hal-hal itu kami mengundang OJK untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat. Dan ada sekedar ataupun sebuah catatan, menurut OJK kalau pertumbuhan ekonomi itu 5,3% itu membutuhkan investasi kurang lebih 5.802 triliun. Sementara kita pahami OJK itu sendiri tidak berdiri sendiri. OJK itu adalah sebuah regulator yang didalamnya ada industry. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu kami undang di sini, supaya kami mendapat gambaran lebih jelas apa kira-kira yang bisa dicapai. Karena kalau dari Kementerian Keuangan yang mengandalkan pajak tidak tercapai, sementara di industry pun tidak tercapai tentunya *sort fall* kita akan semakin dalam. Kalau *sort fall* kita semakin dalam sudah pasti Menteri Keuangan terbaik kita itu hobynya ngutang. Kalau itu berhutang untuk Pemerintahan mungkin tidak ada masalah, tapi untuk berikutnya bagaimana, karena yang namanya kekuasaan itu tidak langgeng. Ini yang menjadi salah satu konsen kami.

Di samping itu rata-rata yang terjadi adalah kapital *inflow*, kapital itu tentunya akan lari di bursa efek, di pasar modal. Kami juga belum lihat ini Bapak Ketua BEJ yang baru terkait dengan rencana pencapaian sebesar kurang lebih 186 triliun yang dibicarakan regulator OJK. Yang berharap adanya di pasar modal, karena kita belum lihat dari catatan yang diajukan arus batas gambaran umum tentang BEJ dan SRO-nya. Kita sendiri tidak tahu apa yang akan SRO lakukan untuk mendukung pencapaian BEJ itu sendiri.

Namun, tentunya hal itu tentunya sudah disampaikan oleh kawan kami Bapak Misbakhun. Juga kita ingin tahu sejauhmana keterlibatan komisioner OJK dengan BEJ ini sendiri, karena kabar-kabar burung inikan kurang baik. Ada lah ini orangnya Husein, ada lah ini orangnya Wimbo. Ketua BEJ-nya itu sendiri terlibat dengan masalah ARTI tanda tanya, belum lagi di KSEI-nya di sana ada Rahmat Waluyanto yang notabene beliau juga Komisararis dari Bank Permata. SRO itu bukan badan hukum akan tetapi berbentuk PT, apakah layak atau bisa mencari untung. Inikan catatan-catatan, catatan-catatan yang menjadi kinerja untuk OJK itu sendiri. Sanggupkah OJK untuk melakukan ini? itu satu catatan.

Terkait dengan masalah asuransi, beberpa waktu yang lalu kami di Komisi XI DPR RI ada permohonan tentang protokol keenam. Kebetulan waktu itu menterinya masih Bapak Bambang Brodjonegoro. Saya waktu itu masih Pimpinan di Komisi VI DPR RI, pindah ke Komisi XI DPR RI, Bapak Bambang Brodjonegoro mengajukan protokol keenam, kita *cut* disini. Menurut catatan kami di Komisi sebelumnya persetujuan yang berhubungan dengan perdagangan dalam tanda kutib perdagangan barang dan jasa termasuk jasa keuangan harus persetujuan DPR RI. Yang celakanya di atas itu, memperbolehkan industry asuransi dimiliki modalnya sampai 80% oleh asing. Sementara di satu sisi aturan regulasi terkait masalah broker, terkait masalah operasional asuransi itu sendiri.

Ini mungkin boleh karena asuransi sudah memiliki Undang-Undang. Ada yang lebih celaka lagi kawan kami dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia), mereka sampai hari ini masih diatur oleh Peraturan Pemerintah bukan Undang-

Undang, padahal tadi disampaikan oleh Ketua APPI, 30 juta nasabahnya. Berapa besar uang yang berputar disana, pantas saja Bapak Suwandi teriak. Selalu diatur oleh POJK, hari ini A besok B, kalau komisionernya besok kita ganti jadi lagi C Pak.

Saya berharap mungkin kepada Bapak Suwandi, atas naam PPI kalau boleh bicara Pak, kumpulkan kawan-kawan itu ayo kita bantu fasilitas. Saya yakin Golkar mau bantu, Nasdem mau, PDIP mau, PPP mau, Demokrat pasti mau, PAN apalagi, Gerindra sudah jelas Pak, kita akan bantu. Ajukan lah itu Pak, bicarakan dengan namanya Ruwisnandi, ayo ajukan Undang-Undangnya supaya ada kekuatan hukum di APPI, para pelaku industry itu. Mereka punya Undang-Undang jadi tidak diatur oleh POJK seenak udel.

Saya mengerti Pak, kalau kita berbicara tentang masalah pinjaman di sini yang namanya Wimbo Ketua Komisioner OJK itu mengatakan sektor perbankan akan menyalurkan 594 triliun, berapa besar yang akan diraih oleh APPI, pelaku industry di pembiayaan. Sementara Bapak tadi sampaikan mengajukan kredit pun empot-empotan. Kenapa saya bicara seperti itu? yang namanya kredit itu bukan bicara karakter, bukan bicara industry, itu karakter Pak, sorry. Kalau memang ada pelaku yang double finance atau triple financing sepanjang dia investasinya bagus *so far* tidak ada masalah. Tapi kalau investasinya busuk ya itukan sudah bicara karakter Pak, bukan bicara industry.

Jangan gara-gara Surya Prima ambil kredit jeblok industrinya yang susah. Belum lagi sebentar lagi ini Pak, tolong dipahami juga APPI industry pembiayaan dan asuransi kayaknya sebentar lagi dilibas oleh asing, tidak perlu lagi Bapak berbisnis di Indonesia, karena asing yang akan memiliki. Mereka melihat pangsa pasar APPI, kawan-kawan yang diindustri itu, itu sampai ke daerah Pak. Bapak Gusti begitu banyak cabangnya, betul Pak Gusti? Sampai ke daerah Pak. Itu pangsa pasar yang sangat menjanjikan.

Saya pikir mungkin Pimpinan, kita perlu pertanyakan juga kepada OJK. Kalau dia berbicara sektor perbankan, karena mungkin minggu depan kita akan bicara dengan perbankan. Kita akan lihat 594 triliun yang ingin mereka salurkan itu kemana larinya. Kalau cuma untuk industri-industri atau anak usaha mereka juga saya pikir percuma saja kita bicara. Karena se yakin-yakinnya pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemerintah tidak akan tercapai. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau terjadi hal seperti ini sementara tadi disampaikan masing-masing Bapak dan Ibu yang ada di sini memiliki padat karya, berarti seharusnya daya beli itu bisa meningkat. Sekarang terbukti tidak meningkat daya belinya, kalau daya belinya tidak meningkat sementara inflasi menurut catatan yang ada di Bank Indonesia sendiri itu ada 3 sampai 3,5%. Kalau mereka berbicara pertumbuhan 5% atau 5,1 sesungguhnya pertumbuhan itu hanya 1,5%, *middle income trap* terus kita, terus dan akan terus disitu. Sementara pelaku industry yang ada dihadapan kita itu secara otomatis dibunuh dan dibunuh dengan peraturan dan peraturan.

Pimpinan, saya mohon bantu saya pikir kita sudah punya gambaran tentang kelakuan OJK yang menurut saya bukannya membantu menumbuhkan idnustri yang akan menumbuhkannya untuk pertumbuhan ekonomi akan tetapi malah buat jelimet sendiri. Dan saya belum dapat catatan juga ini dari para pelaku di sini, baik dari asuransi jiwa, asuransi kerugian ataupun APPI. Apakah pungutan OJK Ini memberatkan atau tidak, karena OJK ini menghindar-menghindar terus untuk mendapatkan APBN. Saya pikir kalau OJK menghindar terus untuk mendapatkan

dana dari APBN lebih baik kita swastanisasi saja OJK itu, tidak perlu lagi ada OJK, percuma malah memberatkan industry dan tidak mendukung industry, malah mereka memperkaya hidup mereka sendiri dengan gaya-gaya saja itu.

Kita harus omongkan jelas apa adanya Pimpinan, kurang lebih demikian Bapak Pimpinan. Saya mohon kepada industry khususnya dari APPI saya sangat mendukung kalau APPI bisa berbicara ataupun diatur oleh Undang-Undang. Tidak usah takut Pak Suwandi ajukan saja, kita bicarakan nanti dengan Bapak Riswinandi, mungkin Bapak Ikhsan juga kita panggil, supaya mereka harus mendukung. Karena industry ini kalau diatur oleh Peraturan Pemerintah nanti POJK dan POJK terus itu yang kasihan industrinya sendiri nanti, nangis-nangis, teriak-teriak.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Kang Heri.
Silakan Ibu Elviana.

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak Bursa Efek Indonesi dan Asuransi juga saya hormati.

Kenalkan Pak Saya Elviana, Fraksi PPP, Dapil Jambi.

Pertama, Pak Inarno senang bisa rapat dengan Bapak, setelah Bapak menggantikan Bapak Tito baru kali ini ketemu resmi di ruangan Komisi XI DPR RI, yang tidak resminya sedang dirancang Pak.

Baik, Bapak Dirut BEI yang saya hormati. Pertama, investasi di bidang saham ini memang kayaknya baru kelas elit. Padahal ketika sekarang masyarakat itu sedang mulai galau dengan isu riba, saya pikir saya sedikit-sedikit mengerti tentang saham. Ini saatnya Bapak mulai meningkatkan literasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana bisnis di bidang saham ini sebenarnya Pak. Saya mendukung beberapa kegiatan BEI, misalnya membuka gallery investasi di kampus-kampus. Tapi sebagai masukan kepada Bapak, itu pihak sekuritasnya tidak menjalankan tindaklanjutnya Pak. Diantaranya saya sebut saja ya, MNC Sekuritas. Mereka kekurangan staf dan tenaga untuk melatih atau mencerdaskan kelompok-kelompok yang berminat di kampus tersebut untuk mengembangkannya.

Jadi jangan sampai galeri investasi BEI itu yang di kampus-kampus hanya sebatas menambah point Bapak-bapak bahwa ini sudah ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Akan tetapi boleh dicek saya melihat kebetulan kampus yang saya kelola di perbatasan Sumbar-Jambi itu tidak jalan, karena tidak diikuti oleh sekuritasnya.

Yang kedua, terhadap emiten-emiten yang mau IPO itu Pak, seberapa ketat sebenarnya BEI melakukan evaluasi. Nah, ada beberapa contoh yang kita baca di web-nya BEI juga, saya sebut saja ya Perusahaan Posa PT. Bliss Properti Indonesia 3 tahun terakhir perkembangan pertumbuhan laporan keuangannya negative, likuiditasnya juga tidak sehat, beresiko pailit, kenapa masih dibiarkan dia menjual sahamnya di bursa. Bagi masyarakat setengah-setengah pengetahuannya apalagi kalau harga sahamnya tinggi mereka akan terlibat, akan aktif di perusahaan-perusahaan, emiten-emiten yang kurang sehat ini. Nah, bagaimana Bapak melakukan evaluasi yang ketat.

Di samping itu saya juga ingin dengar berapa persen daripada emiten itu yang benar-benar real IPO bukan strategic saja. Karena saya dapat informasi juga mayoritas mereka hanya IPO itu hanya untuk strategic, hanya sebatas mendapatkan label Tbk, sebenarnya bisnis sahamnya tidak jalan. Jadi saya ingin mendapatkan hal-hal seperti itu sebelum nanti kami rapat dengan OJK.

Kemudian ini Pak, menarik ini Pak, UKM katanya bulan September besok ada yang mau melantai di bursa. Apakah mungkin Pak, membuka speck kalau selama inikan bursa itu kan perusahaan besar. Mungkin Bapak punya ide membuka satu ruang kecil, sahamnya murah meriah, tetapi memberikan kesempatan kepada UMKM untuk juga ikut melantai di bursa. Itu untuk Bursa Efek.

Kepada teman-teman asuransi jiwa, saya pikir OJK sudah sangat baik Pak. Siapa sih yang tidak tahu kalau Asuransi Bumi Putra itu sekarang sedang, kami bentuk Panja gitu. Tetapi bos OJK bilang AJB Bumi Putra dalam posisi sehat, nah itu kurang baik apa OJK saya pikir gitu, sementara sebenarnya seperti apa sih Pak, kondisi Bumi Putra itu. Di Dapil saya di Jambi Pak, itu sudah antri, orang yang sudah final polisnya sudah selesai tetapi untuk claim-nya bermacam-macam Pak, ada yang sudah antri 3 tahun, ada 4 tahun. Sementara yang saya dengar juga asuransi ini terus menambah nasabah atau anggota-anggota baru.

Nah, kita kan tidak pernah mendengar bagaimana asosiasi ini bersikap. Tambah lagi sekarang yang mulai menggelembungkan Asuransi Jiwa Sraya juga info-infonya sudah mulai ini juga. Jujur ya Pak, saya termasuk orang yang tidak tertarik dengan asuransi. Pengalaman saya ketika saya punya mobil mobil saya jelas digeser orang lalu meng-claim contoh kecil itu ampun susah. Padahal kalau saya bawa ke bengkel paling saya kena 800 sementara yang saya bayar polisnya 9-10 juta. Sampai sekarang hampir semua mobil saya tidak saya asuransikan. Bagaimana mungkin itu masyarakat awam akan ikut berasuransi gitu. Karena pengalaman-pengalaman jelek tentang asuransi itu berkembang di masyarakat.

Demikian Pimpinan, kita ingin mendengar banyak dari teman-teman, mohon maaf kalau ada yang salah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Pak Achmad Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Tidak selama dengan Pimpinan, lebih sedikit dari Bapak Heri, ini sedikit saja.

Bapak dari Bursa Efek, teman-teman dari pihak asuransi. Yang pertama, saya ingin tahu bagaimana pandangan dari Bursa Efek Indonesia terhadap laporan keuangan PT. Garuda Indonesia dan juga isu-isu terkini, bagaimana Bursa Efek Indonesia ini. Itu satu Pak.

Yang kedua, tadi Ibu di sebelah ini pandangan tadi itu betul ya Pak. penempatan dana nasabah itu terkadang seperti ada pemaksaan dari asuransi ini. Tetapi ketika polis itu dicairkan minta ampun, bahkan terkadang nasabah itu sudah mengalami resiko sosial, polis pun belum bisa dicairkan.

Yang berikutnya saya melihat di halaman 9 terkait dengan implementasi notasi khusus dalam rangka meningkatkan proteksi investor terkait dengan kinerja emiten. Saya melihat ada 6 point dari notasi khusus ini Pak, untuk implementasi dari notasi khusus. 6 point ini saya melihat rata-rata memenuhi standart akuntansi, norma akuntansi terpenuhi. Dari opini, dari equitas negative termasuk pernyataan pailit. Hanya ada satu disini Pak, ketika perusahaan ini menyatakan bahwa dia masih sanggup menyelesaikan kewajibannya, ada pengaruh tidak Pak, dari 6 point ini Pak. Opini Tidak Wajar, termasuk juga laporan keuangan terakhir menunjukkan sama sekali tidak ada pendapatan. Hanya ada satu point disini bahwa dia masih, artinya dia masih sanggup ya Pak, menyelesaikan seluruh kewajibannya. Itu ada kelonggaran lah Pak, walaupun permohonan menyatakan pailit sudah diajukan.

Yang berikutnya Pak, terkait dengan sebaran tadi Pak. Nah, ini terkait dengan sebaran investor pasar modal di Indonesia. Pak, ada di halaman 16 saya melihat ini dikawasan ini prosentasenya kecil sekali. Investornya 1,19 tidak sampai 2 ya Pak, padahal ini ada 4 provinsi di kawasan ini. Jadi Papua ada 2, Papua dan Papua Barat, kemudian Maluku dan Maluku Utara. Transaksinya juga di bawah bahkan tidak sampai 1% atau 0,09% dibandingkan dengan kawasan yang lainnya.

Yang terakhir saya ada satu tadi Bapak sudah jelaskan sudah halaman 20. Rata-rata frekuensi transaksi saham harian, tadi Bapak mencontohkan apa tadi saya kurang rekam. Tetapi dari grafik disini Pak, tercatat dari tahun 2013 yang 14, 15, 16 sampai dengan tahun 2017 itu kita masih jauh tertinggal dengan Thailand. Kita baru bisa beranjak di tahun 2018 dan posisi sampai dengan April 2019. Tahun 2018 Indonesia dengan Thailand juga sparenya sedikit sekali antara 342 dan 387. Mudah-mudahan ini Pak, tahun 2019 dan seterusnya ini kita akan lari terus meninggalkan Thailand.

Jadi Pak, barangkali dari saya itu.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Lanjut Bapak Jon Erizal.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan teman-teman Komisi XI DPR RI,
Bapak-bapak dari Bursa, dari APPI, kemudian dari asuransi dan yang mendampingi.**

Maaf belum kenal Pak, kita sudah hampir selesai ini Pak, tapi belum kenal ya. Jadi saya mau mengkritisi itu satu. Sayang Pak, Bapak punya wakil disini tetapi Bapak tidak dekat, sayang. Nah, itu ke depan menurut saya rugi, karena kamilah yang bisa memanggil OJK, kamilah yang bisa memanggil lain-lain, kami perlu peading. Saya lihat ini mitra-mitra yang ada di bawah kita itu berjalan sendiri-sendiri, harusnya bisa bersinergi sama kami. Artinya, saya tidak tahu apakah takut bertemu dengan DPR RI atau apa, padahal DPR RI sekarang ini manis-manis Ibu-ibunya, Bapak-bapaknya kayak gini. Jadi sayang Pak, itu yang saya lihat selama ini. Dan ini juga selama lembaga ini memiliki manajemen yang baru kami belum melihat juga ada inisiatif dari Bapak-bapak untuk bersilahturahim atau artinya kami sebagai pengawas secara keseluruhan yang bisa dimaksimalkan.

Ada beberapa hal yang kita lihat ini ya Pak, kalau sinergi itu terjalin dengan banyak Bapak-bapa mudah, karena apa? pengawas Bapak, dalam konteks ini mungkin OJK itu akan betul-betul bisa menerima apa-apa yang datangnya atau diusulkan dari kita dalam konteks memang untuk hal-hal yang konstruktif. Nah, kami dengan keterbatasan yang ada tentu tidak bisa semua aspek kami tahu itu Pak.

Point kedua, kami ini ada di seluruh Indonesia Pak, di setiap Dapil. Tadi Ibu Elviana itu sudah menyampaikan, jadi apa-apa program untuk menunjang pekerjaan Bapak ini kami bisa menyampaikan. Orang bingung Pak, di lapangan itu kalau Bapak-bapak ikut kami turun ke tidak usah desa lah, sampai tingkat kabupaten saja bingung. Apa itu bursa, bahkan jangankan bursa Pak, apa itu OJK saja masih bingung apa fungsinya.

Betapa jauhnya harapan terhadap target literasi yang diharapkan yang kita kenal dengan *financial inclusion*, pendekatan-pendekatan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan itu masih lebar sekali. Sayang kami tidak dimanfaatkan, kami sendiri terbatas. Mau menerangkan soal inikan tidak pernah ketemu kan sayang Pak. Nah, ini masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk periode 2014-2019 ini kami masih insya allah sampai bulan September. Sebagian besar teman-teman di sebelah sini terpilih kembali, ada yang pindah menjadi Bupati, pindah menjadi Gubernur, ada yang pindah jadi DPD, tapi sebagian besar itu kembali. Nah, oleh karena itu ke depan ini harus kita manfaatkan.

Saya agak tertarik dengan hal yang berkaitan dengan maraknya sekarang produk-produk yang gencar sekali dengan segala *scheme* yang dibuat yang berkaitan dengan menyerap dana masyarakat. Kita kan paham Pak, Undang-Undang itu hanya

membolehkan lembaga menerima dana masyarakat itu adalah perbankan. Dan belum ada aturan lain lembaga di luar itu boleh. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak yang ada di asosiasi perusahaan pembiayaan. Apakah lembaga-lembaga itu masuk di asosiasi yang Bapak kelola tersebut, karena ini harus betul-betul *clear* melihat.

Kenapa perbankan yang diperbolehkan, kalau menurut pemikiran saya semangat Undang-Undangnya itu adalah karena apa? pertama, perbankan modalnya itu mumpuni, kalau tidak salah kan 10 triliun. Kedua, SDM-nya juga sertifikasi dan seterusnya. Tetapi kalau ada lembaga-lembaga yang juga mengadakan pendekatan terhadap dana masyarakat ini, itu Undang-Undang kalau menurut saya belum ada membolehkan. Kalau pun ada aturan baik POJK yang berkaitan dengan *peer to peer* misalnya dari BI yang berkaitan dengan e-money. Kalau menurut saya kok tidak link dengan Undang-Undang. Jadi ini perlu tolong dijelaskan kepada kami sejauhmana lembaga-lembaga tersebut ada di bawah asosiasi tersebut.

Kemudian yang berkaitan dengan asuransi, kita juga melihat semakin hari ke depan ini asuransi muncul banyak permasalahan-permasalahan yang timbul. Beberapa waktu yang lalu dan kami sudah membentuk Panja juga terhadap Bumi Putra. Nah, kemarin kebetulan saya yang hadir di Medan bersama teman-teman sebagian kami, kami bagi 3 kemarin Pak. Saya menyampaikan banyak keputusan yang diambil itu hanya untuk menunda, melemparkan ke gelombang yang berikutnya. Sehingga harusnya bisa diatasi pada awal-awal pada saat kondisi credit itu masih jumlahnya cukup besar tetapi tidak sebesar sekarang, tapi selalu dilemparkan kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi dan sekarang sudah besar sekali dan mungkin itu topik khusus nanti kita bicara lagi.

Nah, ini bagaimana menyikapi asosiasi seperti ini. Dan tidak jarang juga sekarang kan banyak juga asuransi-asuransi terutama asuransi yang berkaitan dengan kerugian itu banyak menjamin sesuatu tapi pada saat terjadi claim misalnya yang berkaitan dengan tender, kan banyak juga sekarang asuransi-asuransi yang bisa mengcover payment bond atau asuransi uang muka dan seterusnya. Nah, ini seperti apa asosiasi menyikapi ini tentu kami akan mendalami itu sejauhmana nanti OJK mengawasi hal ini. Nah, ini kami perlu juga masukan.

Nah, kemudian apa-apa yang diatur di OJK barangkali tadi teman-teman sudah menyampaikan juga itu efektif tidak menurut Bapak-bapak, sampaikan kepada kami Pak. Inilah momentnya, kalau Bapak-bapak diam rugi, berbedanya jauh sekali Pak. Kalau Bapak-bapak yang menyampaikan ke OJK sama Bapak-bapak menyampaikan kepada kami, kami yang menyampaikan ke OJK. Kami akan berpijak betul-betul untuk kepentingan bangsa. Bagaimana lembaga-lembaga ini tumbuh, hidup besar dan saling mendukung, jadi bukan saling menakut-nakuti.

Kami disini juga sudah merubah bahwa DPR RI itu bukan untuk ditakuti, tapi bagaimana mensinergikan mitra-mitra yang ada di bawah kami ini. Tapi kami punya keterbatasan terhadap informasi yang ada. Nah, inilah perlu satu hal untuk kita meningkatkan kualitas komunikasi kita masing-masing apalagi dengan data. Dan kalau waktu mungkin ya kami juga agendanya cukup padat, Bapak-bapak kami yakin juga padat kan bisa komunikasi tertulis Pak. Sampaikan kepada Komisi XI DPR RI kalau ada hal-hal yang strategis sampaikan. Karena begini Pak, pembahasan yang berkaitan dengan anggaran berawal dari Komisi ini bersama dengan Pemerintah. Apa yang kami tentukan pada saat awal sebelum anggaran itu turun sampai kepada tahap

pelaksana. Kami sepakat dulu dengan Pemerintah asumsi yang kita sebut dengan asumsi makro. Sebelumnya yang hadir di kami itu hanya Menteri Keuangan mewakili Pemerintah, Bappenas, BPS yang berkaitan dengan data, kalau Bappenas dari perencanaan pembangunan. Kemudian ada Bank Indonesia yang berkaitan dengan moneter.

Pertemuan kemarin itu kami sudah minta kepada OJK datang, karena selama ini BI yang datang mewakili dua hal tadi ... **(rekaman terputus)** ... baik makro maupun mikro prudensial. Tapi karena ini sudah terpisah kami minta. Apa maksudnya? Supaya kami juga dapat informasi, dapat perencanaan bagaimana pertumbuhan terhadap yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang di bawah atau dibina oleh OJK ini.

Mungkin ke depan tahun-tahun berikut ini kami akan balik Pak, Bapak-bapak dulu yang kami undang. Misalnya kemarin disampaikan kita akan tumbun menurut Pemerintah ini Menteri Keuangan antara 5,3 sampai 5,6% dengan catatan pertumbuhan bursa mencapai sekian persen. Nah, kami mau mengkonfirmasi kemana pertumbuhan kredit mencapai sekian persen, pertumbuhan lembaga keuangan lainnya mencapai sekian persen.

Kalau Bapak-bapak tidak memberikan informasi yang jelas kepada kami nanti pada diujungnya mencari kesalahan. Oh, nanti Pemerintah bilang karena kredit tidak tumbuh, karena bursa juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kita balik saya ingin mengajak pada kesempatan ini ke depan mari kita bangun satu hubungan yang lebih, produktif, konstruktif, kemudian komunikasi betul-betul bisa kita tingkatkan.

Demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Direksi Bursa Efek Indonesia, KPEI, KSEI, kemudian juga asosiasi pembiayaan dan asosiasi asuransi.**

Jadi saya mau membahas secara khusus, jadi saya minta agak waktu karena pertama adalah yang disampaikan oleh Bapak ini sangat penting dan menarik, yaitu rencana strategis jangka panjang perusahaan Bursa Efek Indonesia 2016-2020i itu adalah menjadi pusat penyelenggara perdagangan efek yang terpercaya dan mendukung pendalaman pasar modal Indonesia.

Memang pendalaman pasar ini pendalaman pasar keuangan. Ini adalah salah satu yang menjadi fokus kita di dalam membicarakan mengenai pembiayaan terhadap

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020. Kita ingin mencari alternatif pembiayaan selain sektor perbankan. Dan begitu membicarakan pendalaman pasar ini saya langsung teringat Bapak Darmin Nasution Menko Ekuin kita yang pada saat membuka pasar modal saya kira Inarno disitu tanggal 2 Januari 2019 kemarin mengatakan kita dari puluhan tahun selalu mengucapkan pendalaman pasar keuangan, tetapi tidak pernah cukup berhasil melakukannya.

Ini katanya dalam sekali ini, saya kira semua pelaku ini puluhan tahun tetapi tidak cukup berhasil melakukannya. Dan disitu Bapak Darmin mengatakan ini adalah jadi ini adalah statement dari Pemerintah sendiri ini. Ini merupakan pekerjaan besar bagi Pemerintah, bagi regulator, dan bagi pelaku pasar. Karena itu, saya ingin mengelaborasi lebih lanjut ini. Apa yang seharusnya dilakukan, baik oleh Pemerintah, oleh regulator dan oleh pelaku pasar. Kalau tidak apa yang disampaikan ini apalagi ini cuma 2016-2020. Bapak Darmin saja mengatakan kita sudah berbicara ini dan saya setuju, bahkan saya sudah bicara puluhan tahun tetapi kita tidak cukup berhasil di dalam melakukannya. Karena ini saatnya sekarang karena Pak Inarno juga Direksi yang baru dan apa yang harus dilakukan, sehingga kami katakanlah DPR RI inikan menyangkut juga kebijakan, perundang-undangan, kalau ada hal-hal yang harus kita lakukan bahkan kalau Presiden mengatakan ada hal-hal yang gila sekali pun misalkan atau maksudnya ada langkah-langkah atau terobosan yang harus dilakukan itu kita lakukan. Kalau tidak ya nanti tahun depan kita akan mengurangi lagi ini statement Bapak Darmin tadi.

Ini sangat penting bagi kita karena pendalaman pasar keuangan ini menjadi satu mantra yang berkali-kali diucapkan tapi kita belum bisa melakukannya. Jadi ini yang kami mintakan sehingga jelas apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah menurut pelaku pasar, apa yang harus dilakukan oleh regulator pelaku pasar dan oleh pelaku pasar sendiri, sehingga nanti kita di Komisi XI DPR RI akan memanggil semuanya nanti di forum ini. Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh regulator, apa yang harus dilakukan pelaku pasar. Sehingga ini betul-betul yang puluhan tahun tidak bisa terwujud itu bisa mulai diwujudkan.

Dalam hal ini Bapak Darmin waktu itu juga menyatakan bahwa sebetulnya problem utama kita itu bukan di supply-nya akan tetapi di demand-nya. Nah, demand ini sangat tergantung kepada kepercayaan. Karena itu, dikatakan bahwa integritas pasar modal itu adalah hal yang utama. Saya kira kalau dibidang keuangan integritas ini memang segala-galanya.

Di sebutkan disitu bahwa *first line of defense*-nya itu adalah *good governance*, *second line defense*-nya itu adalah auditor atau akuntan dan *line defense*-nya itu adalah regulator. Nah, saya mau meng-address satu per satu hal ini. *good governance* ini memang sangat penting sekali. Bursa juga untuk melakukan tindakan terhadap pelaku-pelaku yang menyimpang, baik masalah keterbukaan informasi maupun masalah transaksi, termasuk penggorengan saham. Kalau kasus-kasus ini dibiarkan bagaimana kita menunjukkan *good governance* kita. Ini adalah hal yang mendasar, banyak kasus-kasus yang mencuat tetapi kemudian kita tidak tahu tindaklanjutnya. Saya kira ini adalah salah satu basis pertama, kan disebutkan *first line of defense*-nya adalah *good governance*.

Nah, ini kalau kita lihat kalau seperti tadi *second line of defense*-nya ini sangat terkait juga dengan masalah akuntan. Kita tahu bagaimana lapoan keuangan PT. Bank Bukopin yang kemudian direvisi, yang melibatkan Kantor Akuntan Publik ini

tindakannya bagaimana ini. Terus kemudia kita juga lihat revisi keuangan PT. Semen Indonesia yang sudah dipublish tetapi kemudian ada pencadangan ini ada hubungannya dengan kasus Bumi Putra. Inikan menunjukkan bagaimana suatu katankanlah hubungan dengan akuntan ini. Kalau memang Kantor Akuntan Publiknya ini bermasalah segala macam bagaimana bursa untuk melindungi *good governance* tadi menyampaikan kepada kami apa misalnya dari Undang-Undang Akuntan ini yang harus diperbaiki.

Saya salah satunya mensyaratkan kepada Kementerian Keuangan untuk supaya partner internasionalnya itu secara akte notaris harus ikut bertanggungjawab kalau ada apa-apa, itu misalnya demikian. Jadi ada langkah-langkah, hal-hal yang bisa disampaikan kepada kami sehingga kita bersama-sama menjaga *good governance* ini. Juga dalam kaitan ini saya memberi catatan bahwa 1 Januari 2020 itukan diterapkan standar sistem akuntansi yang baru, yang ada sesuai dengan ada PSAK 71, 72, 73. Seberapa jauh kesiapan perusahaan-perusahaan kita untuk itu, karena ini tidak mudah. Dan kalau tidak siap bagaimana gitu ya, selama ini apa yang dilakukan bursa untuk itu, karena itu menyangkut seperti PSAK itu segala macam menyangkut ada instrument keuangan dan seterusnya, kemudian juga ada pengakuan mengenai kontrak dan seterusnya. Ini menurut kami yang dilapangan cukup harus ada aksi yang mesti disiapkan sejak jauh-jauh sebelumnya, tidak bisa tiba-tiba 1 Januari mereka memenuhi standart ini.

Saya hanya mengatakan yang sekarang saja tadi disebutkan oleh teman saya yang kasus Garuda inikan masih ramai juga ini. Tetapi tolong kalau menurut saya kita jangan hanya melihat, kita kan menjaga integritas pasar ini. Jangan hanya melihat bahwa bagaimana pencatatan itu melanggar atau tidak, tetapi gunakanlah juga yang disebut akal sehat. Kalau orang mau pinjam diperbankan saja ada persyaratan current ratio. Nah, bagaimana perusahaan yang baru modal 10 miliar bisa memberikan hutang atau piutang 3 triliun, itu pembukuannya kayak gimana, akal sehat saja. Modal 10 miliar masa dia akan mengaku hutang 3 triliun. Kalau saya balik kalau itu datang ke bank mau dikasih gak sama bank, ada persyaratan current ratio. Jadi mau dibolak-balik dengan standart segala macam saya heran kalau itu. Saya mikir ini sebenarnya kan *common sense* saja dan itu yang ngasih siapa? Perusahaan wifi yang ada di pesawat. Saya naik beberapa kali Citilink itu malah wifinya belum jalan kok, kok sudah bisa memberikan piutang 3 triliun.

Yang kayak gini-ginilah menurut saya bagaimana kita mau mengembangkan pendalaman pasar modal kalau praktek-praktek ini dibiarkan. Saya sangat menghargai upaya misalnya untuk mendonkrak emiten. Tetapi tolong perhatikan emiten-emiten yang 500 terutama 500 miliar di bawah 1 triliun itu dengan mudahnya naik sekian kali lipat prakteknya kemudian nanti direpo ke perbankan. Nah, ini juga nanti akan jangan sampai terjadi kasus lagi, repo saham yang sebetulnya itu digoreng-goreng itu. Ini saya kira praktek-praktek yang semuanya kita paham, tetapi justru integritas bursa sangat menentukan. Baru nanti yang ketiga kita akan bicara dengan OJK mengenai hal ini.

Nah, dalam hal ini Bapak Inarno itu yang perlu kita ukur juga itu memang tadi perkembangan pasar saham kita ini sangat bagus tetapi selain pasar saham kita juga punya surat utang. Ini yang juga tolong di sampaikan sejauhmana ini dan perbandingannya bagaimana perkembangannya.

Terus kedua, saya ingin mencatat bahwa perkembangan yang bagus itu tapi saya ingin bursa kita ini benar-benar menjadi *center of excellent*. Karena itu saya ingin kita itu bisa meningkatkan likuiditas pasar saham terutama untuk perusahaan yang berkapitalisasi pasar. Karena ketika kami bicara dengan banyak investor dia mengatakan kita ini kala diukur dari morgan stanley capital index emerging market masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi PDB kita.

Nah, inilah menurut saya salah satu ukuran juga keberhasilan daripada bursa saham kita. Kemudian juga masalah retail investor kita, tadi digambarkan disitu posisi kita keempat, tapi kalau saya melihat ratio terhadap penduduknya kita yang paling kecil Pak. Nah, ini juga dalam hal ini misalnya kan waktu itu ada program penggalakan mengenai menabung saham. Tetapi di daerah itu banyak yang tertarik Pak, tapi kenapa mesti harus datang ke kantor cabang yang ditunjuk, kan berarti *delivery*-nya menjadi terbatas.

Di Malang itu contohnya di tempat kami orang yang dari Batu itu harus datang ke Kota Malang untuk melakukan ini. Artinya, bahwa sebetulnya kalau mau melakukan program itu termasuk kemudian *delivery*-nya apalagi sekarang sudah ada teknologi. Harusnya itu dapat dimanfaatkan.

Saya kira untuk berikutnya dan yang berikutnya itu mengenai pasar surat utang kita Pak. Itu kalau kita lihat *corporate bond* inikan kita sebetulnya juga masih rendah Pak, dibandingkan dengan negara lain. Tolong diberikan juga masukan apa hal-hal yang tadi bisa dilakukan untuk meningkatkan ini.

Untuk asosiasi perusahaan asuransi, saya kira kita perlu dari pelaku juga itu tadi bagaimana para pelaku juga meningkatkan *good governance*-nya, karena kami juga akan mengecek kepada OJK sebetulnya hal-hal itu bisa diantisipasi kalau akan terjadi. Karena kalau kita evaluasi banyak produk yang sejak dari awal *by desain* itu rugi. Tetapi kenapa itu bisa diajukan oleh pelaku dan kemudian juga disetujui oleh OJK. Itu yang sekarang bermasalah itu sebetulnya kalau dievaluasi benar produknya inikan memang *by desain* itu rugi. Kenapa? Karena return yang diberikan itu sangat susah bagi perusahaan asuransi untuk melakukannya. Jadi supaya dia laku jualannya mungkin Komisi-nya didapat dan seterusnya, karena kan biasanya *agent base on commission* akhirnya produknya dibuat produknya itu dianggap menarik, inovasi pasar tapi sebetulnya *by desain* adalah produk yang rugi.

Ini tentu kita sebelum bicara masalah penjaminan dan segala macam saya kira perusahaan asuransi, karena penetrasi asuransi kita, aset PDB kita kan masih sangat rendah. Coba kalau kita bandingkan dengan Singapura dan Malaysia berapa, coba saya minta ininya.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Bapak Andreas terima kasih pertanyaannya.

Kami tidak bawa datanya akan tetapi kalau saya boleh sampaikan angka yang kami pernah lihat tahun 2013-2014 Pak, kita saat itu masih di 1,1% dan hari ini masih di 1,3%. Pada saat itu Malaysia sudah disekitar 3,6% dan Thailand sekitar 3,3% dan Singapura mungkin sudah ada di sekitar 8% dari PDB-nya.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Artinya kita ini tidak bergerak. Inilah sebetulnya juga secara keseluruhan harus kita review ini. Apa yang menyebabkan ini? kembali kepercayaan tadi. Jadi bagaimana apalagi nanti ini akan meledak ini, bukan hanya satu asuransi ini dan itu besar-besar. Karena itu, sangat penting untuk duduk bersama kita mereview bahwa bagaimana mengembangkan industry bersama-sama dengan konsep tadi. Apa yang dibuat oleh regulator, apa yang dibuat oleh pelaku industry dan apa yang dibuat oleh Pemerintah.

Untuk asosiasi pembiayaan ini Pak Suwandi, saya kira sama juga, supaya juga asosiasi dengan Anggotanya tadi saya *respect* ke Bapak Heri tetapi bagi saya sangat menampat itu ...(suara tidak jelas) finance itu. Satu perusahaan yang namanya sebenarnya cukup besar tapi bisa membobol bank 14 bank dan angkanya juga cukup signifikan 14 triliun lagi kalau tidak salah itu totalnya. Tetapikan sebetulnya mereka sudah bisa memiliki 14 triliun pinjaman dan sekarang bermasalah 2,4 triliun. Nah, bagaimana bank kemudian jadi punya pengalaman buruk. Ini yang saya kira perlu dilihat sehingga memang padahal modal utamanya *finance company* itukan sebenarnya dari perbankan salah satunya. Karena itu, tantangannya ini menurut saya perusahaan pembiayaan ini harus melihat secara jernih. Karena pertama adalah tingkat bunga, kalau tingkat bunganya BI naik kan otomatis ini.

Kemudian yang kedua adalah saya lihat tantangan terbesarnya Juga tadi, sektor konsumennya tadi yang motor itukan berarti harus berubah ke sektor yang lain, yang sektor produktif. Belum kemudian masalah technology financial maupun Fintech. Inikan kalau mau main di modal kerja dan segala macam itukan juga base-nya juga dilakukan oleh Fintech. Karena itu sangat penting tetapi memang saya sependapat potensinya sebenarnya masih besar. Namun yang tadi itu, kalau kemudian tata kelolanya cukup tidak bagus ini juga akan sebetulnya menimbulkan sudah bagus ini karena itu jadi harus turun lagi. Sehingga memang ini menurut saya *grand* atau *road map* ke depannya Undang-Undang okelah salah satu tapi *road map* ke depannya kalau kita melihat pasar keuangan Indonesia sebetulnya itu harus ada pembagian. Jangan sampai kemudian katakanlah misalkan yang sangat masih belum tergarap itukan misalnya yang modal kerja, yang jangka pendek dan segala macam itu. Tapi kalau seperti itu berarti kan perusahaan pembiayaan harus punya kemampuan untuk mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga yang sebetulnya cukup kompetitif.

Hal-hal seperti inilah yang menurut saya kalau asosiasi memiliki *road map* itu tolong disampaikan kepada kami. Justru kami itu nanti bicara dengan OJK kan disitu Pak. Tapi kalau tidak ada *road map* jangan kemudian nanti disalahkan loh tiba-tiba kalau sudah koleps yang cuma bisa menyelamatkan asing, karena ini *roadmap* kita ini belum kita susun dengan baik.

Saya kira ini yang penting ingin kami sampaikan, jadi kita adalah sangat menaruh harapan terhadap pendalaman pasar keuangan. Karena kita tahu bahwa pembiayaan perbankan kita itu punya keterbatasan dan kita akan bisa bertumbuh tinggi itu kalau ada alternative dari sisi pembiayaan, kuncinya disini. Karena itu, jangan sampai harapan baru ini, itu kemudian jadi patah karena ada kasus-kasus yang sebetulnya itu berhubungan dengan tata kelola, berhubungan dengan katakanlah praktek-praktek yang sangat Indonesia itu masih rendah. Baik dibidang penetrasi asuransinya bahkan dana pensiunnya, bahkan untuk sektot-sektor keuangan yang lain. Dan menurut saya inti daripada kita punya alternative pembiayaan kalau kita bisa

matching antara dana jangka panjang dengan pembiayaan jangka panjang. Dan disinilah sebetulnya lembaga pembiayaan, baik nonbank itu sangat berperan termasuk pasar modal.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Indah.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Menambahkan sedikit saja setelah apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi terdahulu cukup lengkap. Itulah Pak, akibat dari ketemuanya 5 tahun sekali atau mungkin saya disini sudah hampir periode yang kedua hampir 10 tahun memang baru pertama kali ketemu.

Saya ingin menanyakan saja, Bapak sekarang itu baru masuk ke Komisi XI DPR RI kali ini ya? baru kali ini ya. Jadi kami senang berjumpa, saya rasa Bapak-bapak juga senang berjumpa dengan kami disini untuk kita melakukan yang interaksi, karena kita tahu bahwa potensi untuk likuiditas yang sumber likuiditas juga berasal asuransi maupun pasar modal itu sangat kita butuhkan.

Mungkin secara konkrit saya usulkan kepada Pimpinan, agar pertemuan per periodic seperti ini bisa dilakukan sehingga tidak hanya kita bertemu dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, OJK, BI itu yang hampir setiap minggu selalu bertemu tetapi saya pikir pelaku atau industry ini jauh lebih penting untuk kita mendapatkan masukan yang akurat dan valid.

Itu saja Pimpinan dari saya.

Dan mungkin yang kami pesankan kepada para asosiasi untuk bisa membangun benar iklim investasi yang ada di dalamnya, baik itu asuransi maupun pasar modal mengingat kesadaran masyarakat kita terhadap asuransi kan masih rendah. Tapi *image* atau persepsi atau opini yang berkembang di masyarakat bahwa asuransi itu hanya manis di awal dan pahit diakhir pada saat mengajukan claim itu sampai saat ini masih sering terjadi. Jadi itu saya pikir menjadi konsen kita bersama agar harapan kita untuk menumbuhkan minat masyarakat kita untuk menempatkan, menginvestasikan dan kesadaran asuransi untuk mem-protect diri bukan hanya saving akan tetapi safety itu bisa kita tingkatkan dengan semakin professional dan bagusnya industry asuransi kita.

Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Cukup ya?

F-P. NASDEM (dr. ANARULITA MUCHTAR):

Sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (dr. ANARULITA MUCHTAR):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI, serta Bapak-bapak dari Bursa Efek, dari asuransi.

Yang ingin saya tanyakan Pak, mengenai pasar modal. Jadi sebesar apa pasar modal itu dapat memfasilitasi atau menghimpun dana yang ada di masyarakat berkala, artinya setahun atau berapa tahun sekali terutama yang setahun sekali yang ingin kami ketahui. Di sini memang sudah ada jawaban dari OJK tapi kan pasti berbeda jawabannya dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian disini.

Kemudian satu hal lagi yang seperti Ibu Elviana tadi bilang, sosialisasi ya Bu. Jadi kalau kami di daerah terus terang untuk namanya bursa efek, asuransi dan segala macam itu sebagian besar terutama di daerah marginal itu masih buta. Jadi bagaimana caranya seluruh masyarakat Indonesia terutama yang dipinggir itu benar-benar mengetahui tentang bursa efek atau saham atau lain sebagainya, karena yang tahunya mereka jualan, bayar, beli atau sekedar nabung di bank. Tidak pernah tahu bagaimana cara mengelola keuangan selain dagang, sementara ada hal lain yang bisa meningkatkan ekonomi mereka, terutama sekali anak-anak muda. Karena kalau saya lihat pengangguran sekarang ini juga sangat meningkat, bagaimana kalau dimasukkan dikategori yang peningkatan ekonomi dengan cara yang lain selain dagang secara selama bisa kita lihat.

Mungkin itu dari kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sudah cukup?

Silakan Bapak Hatari.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Dari Bursa Efek Pak, ada lupa sedikit tadi ya.

Sudah sepakat ini tadi bahwa kurvanya tadi Pak, kurvanya tadi baru 2018 kita mengimbangi Thailand, sejak 2013 itu unggulnya Thailand. Dari rata-rata frekuensi transaksi, begitu ya Pa. Nah, ada kelupaan saya lihat ternyata perbandingan pasar modal di Asia terkait dengan kapitalisasi itu, itupun kita tetap juga di bawah Thailand. Bukan hanya kapitalisasi perusahaan tercatat, perusahaan tercatat itu kita sedikit di atas Philipina. Apalagi investor atau prosentase populasi ini annual report tahun 2017

nanti diperiksa lagi Pak, itu kita paling terkecil untuk Asian atau tidak sampai 1% atau setara 0,36%, paling terkecil untuk negara Asian. Itu saja Pak, nanti Bapak bisa jelaskan sebenarnya apa ini indikator.

Terkait dengan 4 provinsi tadi di kawasan itu barangkali ini juga soal demografi. Barangkali Bapak soal disparitas penduduk, luas orangnya sedikit, tidak sampai 1% tadi Pak.

Terima kasih Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Sedikit, tadi agak umum sekarang agak teknis Pak.

Ini khusus untuk industry pembiayaan, saya melihat aktifitas pinjaman luar negeri lumayan ini Pak. Itu bentuknya apa Pak ya, bentuk *offshore* yang diperoleh dari luar itu bentuknya apa.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Kebanyakan sindikasi Pak, sindikasi bank loan.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Oh, sindikasi bank loan ya.

Artinya dibiayai melalui loan bank ini ya.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Iya, dari bank-bank asing dia memberikan pinjaman dalam US Dolar, tetapi pinjaman tersebut kita *hedging* Pak. Jadi kita pinjamnya Rupiah sebenarnya, tapi dari mereka US Dolar indikasi awalnya.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Ini kita menyalurkan maksudnya?

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Tidak, kita meminjam.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Kita dapat kan.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Kita dapat pinjaman.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Jadi mereka sindikasi bersama yang lain-lain, kita

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Mendapatkan pinjaman dari bank-bank asing itu.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Itu semua di *hedging*?

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Di *hedging* Pak, karena peraturannya kita mengikuti peraturan Bank Indonesia yang diadopsi dengan Peraturan OJK sama dengan Bank Indonesia Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Kemudian kedua, pertanyaan saya untuk *placement*, itu kira-kira diluar yang berkaitan dengan kendaraan bermotor itu ke sektor mana yang lebih besar. Mohon ijin interaktif ya Pimpinan.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Kalau di selain roda empat dan roda dua kalau untuk di alat berat itu ada 4 industri Pak. industry mainning, industry agri culture, industry infrastructure, satu lagi kehutanan Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Itu alat beratnya yang dibiayai?

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Alat berat.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Oke.

Ada tidak klasifikasi Pak, dalam *placement* ini persentasenya kalau diperbankan kan ada batas maksimum pemberian kredit. Nah, kalau kita untuk group itu atau ini berputarnya di satu group usaha atau beberapa group usaha saja atau mungkin nanti saya perlu itu kalau bisa disusulkan berapa jumlah *placement* yang Bapak lakukan terhadap perusahaan. Jadi ter-*spreading* bagus tidak itu, kalau misalnya ada kesulitan itu kebijakan apa yang Bapak perlukan untuk kita dorong agar POJK-nya mengarah kepada Bapak bisa lebih fleksible misalnya. Jadi saya perlu data itu Pak.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Siap.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Sementara bisa dijawab lisan dulu.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Bicara mengenai legal landing limit yang ada seperti diperbankan, di kami ada yang namanya batas maksimum perusahaan pembiayaan atau pemberian pembiayaan kepada satu perusahaan, yaitu 20% dari equitas, dari modal atau kalau dari one obligor itu adalah 50%. Jadi contoh misalnya saya punya 1 triliun equitas, da satu group punya 3 perusahaan, saya hanya bisa memberikan pada perusahaan yang pertama A 20% dari equitas 200 miliar, yang B 200 miliar, yang C sisanya hanya boleh 100 miliar, 50% dari keseluruhan.

Diskusi ini kita adakan bersama memang pada awalnya OJK ingin mengadopsi sama dengan legal landing limit yang ada di perbankan. Namun, legal landing limit ini akan lebih banyak mengena kepada perusahaan pembiayaan yang fokus di pembiayaan alat berat. Karena alat berat jumlahnya yang Catex-nya yang akan dipakai oleh satu perusahaan itu cukup besar.

Nah, dari anggota-anggota kami khususnya bermain di alat berat banyak perusahaan-perusahaan asing Jepang maupun perusahaan-perusahaan yang lokal sendiri juga yang terkait dengan distributor ship. Seperti tempat saya bekerja hari ini dengan Caterpillar, yaitu Trakindo Pak. Nah, ada sedikit waktu itu diskusi bahwa tidak bisa kita samakan legal landing limitnya diterima karena yang namanya sewa guna usaha sebenarnya kami bukan memberikan pinjaman kepada tersebut. Sifatnya sewa guna masih milik kami. Pada saat akhir tentu akan menjadi milik Lesi dengan hak opsi jadi berbeda dengan pinjaman Pak. Tetapi ada beberapa point juga yang bisa kita terima dari OJK, kami membeli alat tersebut adalah dari pinjaman perbankan. Jadi diatasnya tentu adalah pinjaman yang harus kita jaga. Akhirnya diterima konsep BMPP ini atau legal landing limit ini Pak, melalui Peraturan OJK waktu itu 29 sekarang dirubah menjadi POJK 35 Tahun 2018 Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Saya juga perlu data dukungan berapa kontribusi sektor perbankan terhadap lembaga pembiayaan ini. Kontribusinya dari total yang Bapak terima tadi saya lihat alokasi pinjaman luar negeri lumayan ini Pak.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Meningkat Pak.

F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Ini yang kita mau tahu juga support dari lembaga perbankan terhadap lembaga ini seperti apa. Tentu ini related pertanyaan kami dengan OJK bagaimana mengawasi ini. Point itu, jadi dua point saya minta ditambahkan.

Terima kasih.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Siap Pak.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Jon. Jadi naiknya plafon pinjaman dari asing itu, itu karena turunnya bank domestic memberikan. Jadi tolong diberikan komparasinya. Karena saya ingin tahu sebetulnya sejauhmana dampak SNP finance itu terhadap pembiayaan perbankan di *finance company*.

Terima kasih.

DIRUT PT. BURSA EFEK INDONESIA:

Sedikit mundur di 2015 Pak, sebenarnya pinjaman perbankan sudah mulai kita lihat kepada perusahaan pembiayaan bukan terhadap kasus SNP, karena beberapa kasus pernah terjadi beberapa perusahaan pembiayaan, tadi yang saya sampaikan *double financing* atau *triple financing* atau *quadruple multiple financing*. Artinya, perusahaan pembiayaan mendapatkan dana dari perbankan lokal itu dengan menjaminkan piutangnya. Nah, penjaminkan piutang itu adalah dengan memberikan list piutang, nama, nomor rangka, nomor mesin, dan jumlah nominal yang akan ditarik, biasanya list satu batch namanya.

Yang terjadi pada saat industrinya tidak tumbuh atau industry kami yang kami biyai tidak tumbuh, perusahaan pembiayaan yang menengah kecil mengalami gangguan likuiditas, Opex-nya terus berjalan. Nah, ini tidak terdeteksi lebih cepat oeh perbankan karena selama ini tumbuhnya sangat tinggi dan tingkat kepercayaan perbankan kepada perusahaan lumayan baik. Nah, perusahaan pembiayaan ini menarik karena ada aturan yang dibuat oleh perbankan kalau AR daripada yang

dijaminakan itu lebih dari 90 hari harus ditukar. Nah, kalau mau ditukar ka nagak sulit ini. Nah, dia tidak punya AR yang ada dijaminakan AR yang sama.

Oleh sebab itu, kita melihat pertumbuhan pinjaman bank kepada perusahaan pembiayaan sejak 2015 itu hanya 0,04%. Nah, lari kemana perusahaan pembiayaan di 2015 tersebut. Menerbitkan MTN Pak, MTN ini mulai ada 2015, 2016, 2017 tidak disadari sama beberapa perusahaan pembiayaan kalau pinjam dari MTN itu selama pinjaman itu hanya bayar bunga. Kalau kami pinjam dari perbankan kan bayar bunga dan pokok, sama dengan nasabah bayar bunga dan pokok. Kita pinjam MTN perusahaan pembiayaan MTN itu nanti bayar pokoknya adalah di masa jatuh tempo. Nah, pada saat semakin ketat dan terjadi beberapa kasus di 2017, 2018 pasar MTN maupun obligasi kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan tiba-tiba stop di tengah-tengah bukan juga karena likuiditas, adanya aturan OJK yang juga memang mendukung program Pemerintah terhadap infrastruktur. Dimana pembeli *corporate-corporate bond* diprioritaskan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur Pak.

Jadi artinya Bapak Andreas, di sini kami tidak bisa me-*refinance* MTN maupun bond. Nah, itu terjadilah situasi yang sulitnya *double whammy*, kepada perusahaan pembiayaan yang memang sulit mendapatkan dana perbankan lokal. Nah, kami di tahun 2017 mencoba mencari tahu dari teman-teman perusahaan pembiayaan di Asia. Kami ke Philipina dan kami ke Australia dan kami menanyakan praktek *double financing* ini pernah terjadi tidak. Di Philipina ada 383 perusahaan multi finance, sebelum 2012 terjadi double praktek financing, ini wajar kata dia. Nah, dibuatlah aplikasi yang tadi saya namakan aset registry. Artinya apa? untuk mencegah harus ada satu alat monitor yang bisa membantu perbankan bahwa kalau dia menjaminkan nomor rangka, nomor mesin, inikan tidak akan terkena yang namanya kerahasiaan perbankan, karena yang didaftarkan hanya nomor rangka dan nomor mesin. Pada saat diberikan kepada perbankan, perbankan mengecek kepada aplikasi ini apakah nomor rangka dan nomor mesin ini pernah dijaminakan kepada bank lain. Nah, kalau pernah dijaminakan kepada bank lain kelihatan bahwa perusahaan tersebut melakukan ada indikasi melakukan *fraud*.

Nah, ini sudah kami bangun Pak, di asosiasi. Jadi tidak ada lagi perusahaan software atau yang komersial tapi asosiasi berinisiasi karena kami mendapatkan ilmu dari Philipina. Kita membangun di Mei 2018 kemarin, kita sudah UIT, kita sudah soft launching, Bapak Riswinandi membuka di bulan Januari. Terus sudah 70 perusahaan mendaftar, 28 perusahaan sudah menandatangani PKS, dan perbankan belum baru 1 yang akan masuk. Memang ini belum menjadi kewajiban, kalau ini bisa menjadi kewajiban saya yakin industry ini, perbankan juga akan mendapatkan manfaat karena akan mencegah yang namanya *double, triple, quadruple*.

OJK juga sedang menggodok Pak, bahwa ini kalau bisa dijadikan kewajiban. Karena biasanya Pak, kalau belum jadi kewajiban perusahaan-perusahaan itu bisa menghindar. Ini sudah kami diskusikan bersama dan agar ini bisa menjadi kewajiban karena di Philipina di Australia ini sejak begitu Philipina dibuat aplikasi ini sejak tahun 2012 sampai hari ini praktek seperti itu tidak terjadi dan kepercayaan perbankan sangat tumbuh Pak. Dan kita perlu daripada kita pinjam dari luar negeri, ongkosnya lebih mahal. Dan luar negeri meliha *opportunity* ini, kesempatan ini dia masuk Pak.

Itu saja kira-kira mungkin menjawab.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cukup ya.

Terima kasih dari pertanyaan Anggota, saya sedikit ingin bertanya juga saya mau menanyakan Asuransi Jiwa Bumi Putra itu masih jadi anggota Asosiasi Asuransi Jiwa?

KETUA ASOSIASI ASURANSI JiWA INDONESIA:

Ijin langsung jawab ya Pak, masih Pak.

KETUA RAPAT:

Termasuk Jiwa Sraya?

KETUA ASOSIASI ASURANSI JiWA INDONESIA:

Masih juga Pak.

KETUA RAPAT:

Anggota Bapak?

KETUA ASOSIASI ASURANSI JiWA INDONESIA:

Masih.

KETUA RAPAT:

Tahu masalahnya?

(SUARA TIDAK TEREKAM)

(RAPAT DITUTUP PUKUL WIB)

Jakarta, 24 Juni 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soediarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**

